



PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KECAMATAN KOTA WAIKABUBAK MENURUT LAPANGAN USAHA

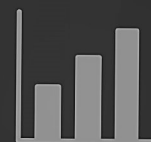
2013-2017



BPS KABUPATEN SUMBA BARAT
DAN DINAS KIPS KABUPATEN SUMBA BARAT

**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
KECAMATAN KOTA WAIKABUBAK
MENURUT LAPANGAN USAHA**

2013-2017



**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
KECAMATAN KOTA WAIKABUBAK
MENURUT LAPANGAN USAHA 2013-2017**

ISBN : 978-602-6597-50-2
Nomor Publikasi : 53015.0101
Katalog BPS : 9302021.5301001
Ukuran Buku : 21,59 cm x 27,94 cm
Jumlah Halaman : x + 52

Naskah :
Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

Gambar Kulit :
Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

Diterbitkan Oleh :
Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumba Barat

Dicetak Oleh :
CV. Inhud

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
KECAMATAN KOTA WAIKABUBAK
MENURUT LAPANGAN USAHA 2013-2017**

Tim Penyusun

Penanggungjawab Umum : Ir. Joke Ratna Christina
Penyunting : Ervina Jayanti Siagian, SST
Penulis : Dyonisius H S Jewaru, SST
Pengolah Data : Dyonisius H S Jewaru, SST

<https://sumbabaratkab.bps.go.id>

KATA PENGANTAR

Publikasi “Produk Domestik Regional Bruto Kecamatan Kota Waikabubak Menurut Lapangan Usaha 2013-2017” ini merupakan lanjutan dari publikasi sejenis yang telah diterbitkan pada tahun – tahun sebelumnya. Publikasi ini disusun oleh Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik, Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumba Barat.

Publikasi ini menyajikan berbagai tabel dasar turunan tentang data pendapatan regional untuk Kecamatan Kota Waikabubak serta analisis deskriptif tentang perkembangan perekonomian Kecamatan Kota Waikabubak dalam periode 2013-2017. Untuk lebih memperjelas berbagai terminologi yang digunakan, disajikan pula konsep, definisi dan metodologi perhitungan yang telah diaplikasikan dalam penyusunan publikasi ini.

Data tahun 2017 yang disajikan masih bersifat sangat sementara. Hal ini tidak dapat dihindari mengingat sampai dengan batas waktu penerbitan beberapa data masih belum terkumpul secara lengkap. Penyempurnaan dan revisi terhadap data tersebut akan dilakukan pada penerbitan berikutnya.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan publikasi ini kami ucapkan terima kasih. Kritik dan saran sangat kami harapkan untuk penyempurnaan publikasi ini di masa yang akan datang.

Semoga publikasi ini bermanfaat.

Waikabubak, November 2018

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK

Kabupaten Sumba Barat



Ir. Joke Ratna Christina

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GRAFIK.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	ix
PENJELASAN TEKNIS.....	x
I. PENJELASAN UMUM.....	1
1.1 Pengertian Produk Domestik Regional Bruto.....	1
1.2 Kegunaan Produk Domestik Regional Bruto.....	2
1.3 Perubahan Tahun Dasar Produk Domestik Regional Bruto.....	2
II. RUANG LINGKUP DAN METODE PENGHITUNGAN.....	7
2.1 Pertanian, Kehutanan dan Perikanan.....	7
2.2 Pertambangan dan Penggalan.....	10
2.3 Industri Pengolahan.....	11
2.4 Pengadaan Listrik dan Gas.....	11
2.5 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, dan Daur Ulang.....	13
2.6 Konstruksi.....	13
2.7 Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor.....	14
2.8 Transportasi dan Pergudangan.....	15
2.9 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum.....	16
2.10 Informasi dan Komunikasi.....	17
2.11 Jasa Keuangan dan Asuransi.....	19
2.12 Real Estat.....	21
2.13 Jasa Perusahaan.....	21
2.14 Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib.....	22
2.15 Jasa Pendidikan.....	22
2.16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial.....	23
2.17 Jasa Lainnya.....	23

2.18	Metode Analisis Kesenjangan Ekonomi.....	25
III. TINJAUAN EKONOMI KECAMATAN		27
3.1	Struktur Ekonomi.....	27
3.2	Pertumbuhan Ekonomi.....	29
3.3	PDRB Perkapita.....	31
3.4	Kesenjangan Ekonomi Wilayah.....	33
IV. PERKEMBANGAN PDRB MENURUT LAPANGAN USAHA.....		34
4.1	Pertanian, Kehutanan, Dan Perikanan.....	34
4.2	Pertambangan dan Penggalan.....	34
4.3	Industri Pengolahan.....	35
4.4	Pengadaan Listrik dan Gas.....	35
4.5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang.....	36
4.6	Konstruksi.....	36
4.7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor.....	36
4.8	Transportasi dan Pergudangan.....	37
4.9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	37
4.10	Informasi dan Komunikasi.....	38
4.11	Jasa Keuangan dan Asuransi.....	38
4.12	Real Estat.....	38
4.13	Jasa Perusahaan.....	39
4.14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib.....	39
4.15	Jasa Pendidikan.....	39
4.16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial.....	40
4.17	Jasa Lainnya.....	40

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 1.1	Perbandingan Perubahan Konsep dan Metode Perhitungan PDRB	5
Tabel 1.2	Perbandingan Perubahan Klasifikasi PDRB Menurut Kategori Tahun Dasar 2000 dan 2010	6
Tabel 3.1	Peranan PDRB Menurut Kategori (persen), 2013-2017	28
Tabel 3.2	Laju Pertumbuhan Riil PDRB Menurut Lapangan Usaha (persen), 2013-2017	30
Tabel 3.3	PDRB Per Kapita Menurut Lapangan Usaha (Rp), 2013-2017	32

DAFTAR GRAFIK

		Halaman
Grafik 3.1	Struktur Ekonomi Kecamatan Kota Waikabubak Menurut Sektor, 2013-2017	27
Grafik 3.2	Pertumbuhan Ekonomi Kecamatan Kota Waikabubak, 2013-2017	29
Grafik 3.3	PDRB Per Kapita Kecamatan Kota Waikabubak (Rp), 2013-2017	31
Grafik 3.4	Indeks Kesenjangan Ekonomi Kabupaten Sumba Barat, 2013-2017	33

DAFTAR LAMPIRAN

		Halaman
Lampiran 1	Produk Domestik Regional Bruto Kecamatan Kota Waikabubak Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, 2013-2017 (juta rupiah)	43
Lampiran 2	Produk Domestik Regional Bruto Kecamatan Kota Waikabubak Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha, 2013-2017 (juta rupiah)	44
Lampiran 3	Distribusi Produk Domestik Regional Bruto Kecamatan Kota Waikabubak Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, 2013-2017 (persen)	45
Lampiran 4	Distribusi Produk Domestik Regional Bruto Kecamatan Kota Waikabubak Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha, 2013-2017 (persen)	46
Lampiran 5	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kecamatan Kota Waikabubak Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, 2013-2017 (persen)	47
Lampiran 6	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kecamatan Kota Waikabubak Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha, 2013-2017 (persen)	48
Lampiran 7	Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto Kecamatan Kota Waikabubak Menurut Lapangan Usaha (2010=100), 2013-2017	49
Lampiran 8	Laju Pertumbuhan Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto Kecamatan Kota Waikabubak Menurut Lapangan Usaha (Persen), 2013-2017	50
Lampiran 9	Indeks Kesenjangan Ekonomi di Kabupaten Sumba Barat, 2013-2017	51
Lampiran 10	Laju Pertumbuhan Indeks Kesenjangan Ekonomi di Kabupaten Sumba Barat, 2013-2017	52

PENJELASAN TEKNIS

1. Penghitungan statistik neraca nasional yang digunakan di sini mengikuti buku petunjuk yang diterbitkan oleh Perserikatan Bangsa Bangsa yang dikenal sebagai “Sistem Neraca Nasional”. Namun, penerapan statistik neraca nasional tersebut telah disesuaikan dengan kondisi sosial-ekonomi Indonesia.
2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tingkat regional (Kabupaten) menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan output (nilai tambah) pada suatu waktu tertentu. Untuk menyusun PDRB digunakan 2 pendekatan, yaitu produksi dan penggunaan. Keduanya menyajikan komposisi data nilai tambah dirinci menurut sumber kegiatan ekonomi (kategori) dan menurut komponen penggunaannya. PDRB dari sisi kategori merupakan penjumlahan seluruh komponen nilai tambah bruto yang mampu diciptakan oleh kategori atas berbagai aktivitas produksinya. Sedangkan dari sisi penggunaan menjelaskan tentang penggunaan dari nilai tambah tersebut.
3. Penyajian PDRB menurut kategori dirinci menurut total nilai tambah dari seluruh kategori yang mencakup kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Pertambangan dan Penggalan; Industri Pengolahan; Pengadaan Listrik dan Gas; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; Konstruksi; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan dan Asuransi; Real Estat; Jasa Perusahaan; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Jasa Pendidikan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; dan Jasa lainnya.
4. Produk Domestik Regional Bruto maupun agregat turunannya disajikan dalam 2 (dua) versi penilaian, yaitu atas dasar “harga berlaku” dan atas dasar “harga konstan”. Disebut sebagai harga berlaku karena seluruh agregat dinilai dengan menggunakan harga pada tahun berjalan, sedangkan harga konstan penilaiannya didasarkan kepada harga satu tahun dasar tertentu. Dalam publikasi di sini digunakan harga tahun 2010 sebagai dasar penilaian.
5. Laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto diperoleh dari perhitungan PDRB atas dasar harga konstan. Laju pertumbuhan tersebut dihitung dengan cara mengurangi nilai PDRB pada tahun ke-n terhadap nilai pada tahun ke n-1 (tahun sebelumnya), dibagi dengan nilai pada tahun ke n-1, kemudian dikalikan dengan 100 persen. Laju pertumbuhan menunjukkan perkembangan agregat pendapatan dari satu waktu tertentu terhadap waktu sebelumnya.
6. **Harga Berlaku** adalah penilaian yang dilakukan terhadap produk barang dan jasa yang dihasilkan ataupun yang dikonsumsi pada harga tahun sedang berjalan.

7. **Harga Konstan** adalah penilaian yang dilakukan terhadap produk barang dan jasa yang dihasilkan ataupun yang dikonsumsi pada harga tetap di satu tahun dasar.
8. **Tahun Dasar** adalah tahun terpilih sebagai referensi statistik, yang digunakan sebagai dasar penghitungan tahun-tahun yang lain. Dengan tahun dasar tersebut dapat digambarkan seri data dengan indikator rinci mengenai perubahan/pergerakan yang terjadi.

<https://sumbabaratkab.bps.go.id>

I. PENJELASAN UMUM

1.1 Pengertian Produk Domestik Regional Bruto

Perencanaan pembangunan ekonomi, memerlukan bermacam data statistik sebagai dasar berpijak dalam menentukan strategi kebijakan, agar sasaran pembangunan dapat dicapai dengan tepat. Strategi dan kebijakan yang telah diambil pada masa-masa lalu perlu dimonitor dan dievaluasi hasil-hasilnya. Berbagai data statistik yang bersifat kuantitatif diperlukan untuk memberikan gambaran tentang keadaan pada masa yang lalu dan masa kini, serta sasaran-sasaran yang akan dicapai pada masa yang akan datang.

Pada hakekatnya, pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja, pemeratakan distribusi pendapatan masyarakat, meningkatkan hubungan ekonomi regional dan melalui pergeseran kegiatan ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier. Dengan perkataan lain arah dari pembangunan ekonomi adalah mengusahakan agar pendapatan masyarakat naik, disertai dengan tingkat pemerataan yang sebaik mungkin.

Untuk mengetahui tingkat dan pertumbuhan pendapatan masyarakat, perlu disajikan statistik Pendapatan Nasional/Regional secara berkala, untuk digunakan sebagai bahan perencanaan pembangunan nasional atau regional khususnya di bidang ekonomi. Angka-angka pendapatan nasional/regional dapat dipakai juga sebagai bahan evaluasi dari hasil pembangunan ekonomi yang telah dilaksanakan oleh berbagai pihak, baik pemerintah pusat/daerah, maupun swasta.

Apa yang Dimaksud dengan PDRB?

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen. Penyusunan PDRB dapat dilakukan melalui 3 (tiga) pendekatan yaitu pendekatan produksi, pengeluaran, dan pendapatan yang disajikan atas dasar harga berlaku dan harga konstan (riil).

PDRB atas dasar harga berlaku atau dikenal dengan PDRB nominal disusun berdasarkan harga yang berlaku pada periode penghitungan, dan bertujuan untuk melihat struktur perekonomian. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan (riil) disusun berdasarkan harga pada tahun dasar dan bertujuan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi.

1.2 Kegunaan Produk Domestik Regional Bruto

Data pendapatan nasional adalah salah satu indikator makro yang dapat menunjukkan kondisi perekonomian nasional setiap tahun. Manfaat yang dapat diperoleh dari data ini antara lain adalah:

1. PDRB harga berlaku (nominal) menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu wilayah. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar, begitu juga sebaliknya.
2. PDRB harga konstan (riil) dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap kategori dari tahun ke tahun.
3. Distribusi PDRB harga berlaku menurut kategori menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap kategori ekonomi dalam suatu wilayah. Kategori-kategori ekonomi yang mempunyai peran besar menunjukkan basis perekonomian suatu wilayah.
4. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDB dan PNB per satu orang penduduk.
5. PDRB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu negara.

1.3 Perubahan Tahun Dasar Produk Domestik Regional Bruto

Selama sepuluh tahun terakhir, banyak perubahan yang terjadi pada tatanan global dan lokal yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian nasional. Krisis finansial global yang terjadi pada tahun 2008, penerapan perdagangan bebas antara China-ASEAN (CAFTA), perubahan sistem pencatatan perdagangan internasional dan meluasnya jasa layanan pasar modal merupakan contoh perubahan yang perlu diadaptasi dalam mekanisme pencatatan statistik nasional.

Salah satu bentuk adaptasi pencatatan statistik nasional adalah melakukan perubahan tahun dasar PDB Indonesia dari tahun 2000 ke 2010. Perubahan tahun dasar PDB dilakukan seiring dengan

mengadopsi rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang tertuang dalam 2008 *System of National Accounts* (SNA 2008) melalui penyusunan kerangka *Supply and Use Tables* (SUT).

Perubahan tahun dasar PDB dilakukan secara bersamaan dengan penghitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten untuk menjaga konsistensi hasil penghitungan.

Apa yang Dimaksud SNA 2008?

SNA 2008 merupakan standar rekomendasi internasional tentang cara mengukur aktivitas ekonomi yang sesuai dengan penghitungan konvensional berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi. Rekomendasi yang dimaksud dinyatakan dalam sekumpulan konsep, definisi, klasifikasi, dan aturan neraca yang disepakati secara internasional dalam mengukur *item* tertentu seperti PDRB.

SNA dirancang untuk menyediakan informasi tentang aktivitas pelaku ekonomi dalam hal produksi, konsumsi dan akumulasi harta dan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan analisis, pengambilan keputusan, dan pembuatan kebijakan. Dengan menggunakan Kerangka SNA, fenomena ekonomi dapat dengan lebih baik dijelaskan dan dipahami.

Apa Manfaat Perubahan Tahun Dasar?

Manfaat perubahan tahun dasar PDRB antara lain :

- Menginformasikan perekonomian regional yang terkini seperti pergeseran struktur dan pertumbuhan ekonomi;
- Meningkatkan kualitas data PDRB;
- Menjadikan data PDRB dapat diperbandingkan secara internasional.

Apa Implikasi Perubahan Tahun Dasar?

Pergeseran harga tahun dasar akan memberikan beberapa dampak antara lain:

- Meningkatkan nominal PDRB, yang pada gilirannya akan berdampak pada pergeseran kelompok pendapatan suatu daerah dari pendapatan rendah, menjadi menengah, atau tinggi dan pergeseran struktur perekonomian;
- Akan merubah besaran indikator makro seperti rasio pajak, rasio hutang, rasio investasi dan saving, nilai neraca berjalan, struktur dan pertumbuhan ekonomi;

- Akan menyebabkan perubahan pada input data untuk *modeling* dan *forecasting*.

Mengapa Tahun 2010 sebagai tahun dasar?

Badan Pusat Statistik (BPS) telah melakukan perubahan tahun dasar secara berkala sebanyak 5 (lima) kali yaitu pada tahun 1960, 1973, 1983, 1993, dan 2000. Tahun 2010 dipilih sebagai tahun dasar baru menggantikan tahun dasar 2000 karena beberapa alasan berikut:

- Perekonomian Indonesia tahun 2010 relatif stabil;
- Telah terjadi perubahan struktur ekonomi selama 10 (sepuluh) tahun terakhir terutama dibidang informasi dan teknologi serta transportasi yang berpengaruh terhadap pola distribusi dan munculnya produk-produk baru;
- Rekomendasi PBB tentang pergantian tahun dasar dilakukan setiap 5 (lima) atau 10 (sepuluh) tahun¹;
- Adanya pembaharuan konsep, definisi, klasifikasi, cakupan, sumber data dan metodologi sesuai rekomendasi dalam SNA 2008;
- Tersedianya sumber data baru untuk perbaikan PDRB seperti data Sensus Penduduk 2010 (SP 2010) dan Indeks harga produsen (*Producers Price Index /PPI*);
- Tersedianya kerangka kerja SUT yang menggambarkan keseimbangan aliran produksi dan konsumsi (barang dan jasa) dan penciptaan pendapatan dari aktivitas produksi tersebut.

Implementasi SNA 2008 dalam PDRB tahun dasar 2010

Terdapat 118 revisi di SNA 2008 dari SNA sebelumnya dan 44 diantaranya merupakan revisi utama. Beberapa revisi yang diadopsi dalam penghitungan PDRB tahun dasar 2010 diantaranya:

- **Konsep dan Cakupan: Perlakuan *Work-in Progress (WIP)* pada *Cultivated Biological Resources (CBR)*:**

Merupakan penyertaan pertumbuhan aset alam hasil budidaya manusia yang belum di panen sebagai bagian dari output kategori yang bersangkutan seperti : nilai tegakan padi yang belum di

¹ SNA1993, para 16.76: “constant price series should not be allowed to run for more than five, or at the most, ten years without rebasing”

panen, nilai sapi perah yang belum menghasilkan, nilai pohon kelapa sawit atau karet yang belum berbuah/dipanen.

- **Metodologi :** Perbaikan metode penghitungan output bank dari *Imputed Bank Services Charge* (IBSC) menjadi *Financial Intermediation Services Indirectly Measured* (FISIM)

- **Valuasi :** Nilai tambah kategori dinilai dengan Harga Dasar (*Basic Price*).

Merupakan harga keekonomian barang dan jasa ditingkat produsen sebelum adanya intervensi pemerintah seperti pajak dan subsidi atas produk. Valuasi ini hanya untuk penghitungan PDB, sedangkan PDRB menggunakan harga produsen.

- **Klasifikasi :**

Klasifikasi yang digunakan berdasarkan Internasional Standard Classification (ISIC rev.4) dan Central Product Classification (CPC rev.2). BPS mengadopsi kedua klasifikasi tersebut sebagai Klasifikasi Baku Kategori Indonesia 2009 (KBLI 2009) dan Klasifikasi Baku Komoditi Indonesia 2010 (KBKI 2010).

Perbandingan Perubahan Konsep dan Metode dari SNA sebelumnya dan SNA 2008 antara lain dijelaskan pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1. Perbandingan Perubahan Konsep dan Metode Perhitungan PDRB

Variabel	Konsep Lama	Konsep Baru
1. Output pertanian	Hanya mencakup output pada saat panen	Output saat panen ditambah nilai hewan dan tumbuhan yang belum menghasilkan
2. Metode penghitungan output bank komersial.	Menggunakan metode <i>Imputed Bank Services Charge</i> (IBSC) .	Menggunakan metode <i>Financial Intermediary Services Indirectly Measured</i> (FISIM)
3. Biaya eksplorasi mineral dan pembuatan produk original	Dicatat sebagai konsumsi antara	Dicatat sebagai output dan dikapitalisasi sebagai PMTB

Perubahan Klasifikasi dari PDRB Tahun Dasar 2000 ke PDRB Tahun Dasar 2010

Klasifikasi PDRB menurut kategori tahun dasar 2000 (2000=100) menggunakan Klasifikasi Kategori Indonesia 1990 (KLUI 1990) sedangkan pada PDRB tahun dasar 2010 (2010=100) menggunakan KBLI 2009. Perbandingan keduanya pada tingkat paling agregat dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.2. Perbandingan Perubahan Klasifikasi PDRB Menurut Kategori Tahun Dasar 2000 dan 2010

PDRB Tahun Dasar 2000	PDRB Tahun Dasar 2010
1. Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan	A. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
2. Pertambangan dan Penggalan	B. Pertambangan dan Penggalan
3. Industri Pengolahan	C. Industri Pengolahan
4. Listrik, Gas dan Air Bersih	D. Pengadaan Listrik dan Gas
	E. Pengadaan Air
5. Konstruksi	F. Konstruksi
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran	G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
7. Pengangkutan dan Komunikasi	H. Transportasi dan Pergudangan
	I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
	J. Informasi dan Komunikasi
8. Keuangan, Real estat, dan jasa perusahaan	K. Jasa Keuangan
	L. Real Estat
	M,N. Jasa Perusahaan
9. Jasa-jasa	O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
	P. Jasa Pendidikan
	Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
	R,S,T,U. Jasa Lainnya

II. RUANG LINGKUP DAN METODE PENGHITUNGAN

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) kecamatan merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu kecamatan yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen. Penyusunan PDRB kecamatan dapat dilakukan melalui 3 (tiga) pendekatan yaitu pendekatan produksi, pengeluaran, dan pendapatan yang disajikan atas dasar harga berlaku dan harga konstan (riil). Adapun ruang lingkup lapangan usaha dalam penyusunan PDRB kecamatan terdiri dari 17 kategori lapangan usaha. Setiap kategori lapangan usaha memiliki sumber data dan metode penghitungan yang berbeda-beda.

2.1 Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

Kategori ini mencakup segala pengusahaan yang didapatkan dari alam dan merupakan benda-benda atau barang-barang biologis (hidup) yang hasilnya dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sendiri atau untuk dijual kepada pihak lain. Pengusahaan ini termasuk kegiatan yang tujuan utamanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri (subsisten) seperti pada kegiatan usaha tanaman pangan.

Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian

Subkategori ini mencakup pertanian tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman perkebunan, peternakan, serta jasa pertanian dan perburuan hewan yang ditujukan untuk dijual.

- **Tanaman Pangan**

Meliputi semua kegiatan ekonomi yang menghasilkan komoditas bahan pangan. Komoditas yang dihasilkan oleh kegiatan tanaman pangan meliputi padi, palawija (jagung, kedele, kacang tanah, kacang hijau, ubi jalar, ubi kayu, palawija lainnya, seperti talas, ganyong, irut, gembili, dll), serta tanaman serelia lainnya (sorgum/cantel, jawawut, jelai, gandum, dll). Keseluruhan komoditas di atas masuk ke dalam golongan tanaman semusim, dengan wujud produksi pada saat panen atau wujud produksi baku lainnya yang masih termasuk dalam lingkup kategori pertanian. Contoh wujud produksi pada komoditas pertanian tanaman pangan antara lain: padi dalam wujud Gabah Kering Giling (GKG), jagung dalam wujud pipilan kering, dan ubi kayu dalam wujud umbi basah.

- **Tanaman Hortikultura**

Tanaman hortikultura terdiri dari tanaman hortikultura semusim dan tanaman hortikultura tahunan. Tanaman hortikultura semusim meliputi tanaman hortikultura yang umumnya berumur pendek (kurang dari satu tahun) dan panennya dilakukan satu atau beberapa kali masa panen untuk satu kali penanaman. Sedangkan tanaman hortikultura tahunan meliputi tanaman hortikultura yang umumnya berumur lebih dari satu tahun dan pemungutan hasilnya dilakukan lebih dari satu kali masa panen untuk satu kali penanaman. Komoditas yang dihasilkan oleh kegiatan tanaman hortikultura meliputi kelompok komoditi sayuran, buah-buahan, tanaman biofarmaka, dan tanaman hias.

- **Tanaman Perkebunan**

Tanaman Perkebunan terdiri dari tanaman perkebunan semusim dan tanaman perkebunan tahunan, baik yang diusahakan oleh rakyat maupun oleh perusahaan perkebunan (negara maupun swasta). Cakupan usaha perkebunan mulai dari pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan yang menjadi satu kesatuan kegiatan. Komoditas yang dihasilkan oleh kegiatan tanaman perkebunan diantaranya adalah tebu, tembakau, nilam, jarak, wijen, tanaman berserat (kapas, rosela, rami, yute, agave, abaca, kenaf, dan-lain-lain), kelapa, kelapa sawit, karet, kopi, teh, kakao, lada, pala, kayu manis, cengkeh, jambu mete, dan sebagainya.

- **Peternakan**

Peternakan mencakup semua usaha peternakan yang menyelenggarakan pembibitan serta budidaya segala jenis ternak dan unggas dengan tujuan untuk dikembangkan, dibesarkan, dipotong, dan diambil hasilnya, baik yang dilakukan rakyat maupun oleh perusahaan peternakan. Golongan ini juga mencakup pembudidayaan ternak maupun unggas yang menghasilkan produk berulang, misalnya untuk menghasilkan susu dan telur. Komoditas yang dihasilkan oleh kegiatan peternakan adalah sapi potong, kerbau, kambing, domba, babi, kuda, ayam bukan ras (buras), ayam ras pedaging, ayam ras petelur, itik manila, itik, telur ayam ras, telur ayam bukan ras, telur itik, susu segar, dsb.

- **Jasa Pertanian dan Perburuan**

Kegiatan jasa pertanian dan perburuan meliputi kegiatan jasa pertanian, perburuan dan penangkapan satwa liar, serta penangkaran satwa liar. Kegiatan jasa pertanian adalah kegiatan yang dilakukan baik oleh perorangan maupun badan usaha atas dasar balas jasa atau kontrak yang khusus

yang diberikan untuk menunjang kegiatan pertanian (tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman perkebunan, dan peternakan). Dicakup juga dalam kegiatan jasa pertanian adalah penyewaan alat pertanian/hewan bersama operatornya dan risiko kegiatan jasa tersebut ditanggung oleh yang memberikan jasa.

Kegiatan perburuan dan penangkapan satwa liar mencakup usaha perburuan dan penangkapan satwa liar dalam rangka pengendalian populasi dan pelestarian. Termasuk usaha pengawetan dan penyamakan kulit dari furskin, reptil, dan kulit unggas hasil perburuan dan penangkapan. Termasuk perburuan dan penangkapan binatang dengan perangkap untuk umum, penangkapan binatang (mati atau hidup) untuk makanan, bulu, kulit atau untuk penelitian, untuk ditempatkan dalam kebun binatang atau sebagai hewan peliharaan, produksi kulit bulu binatang, reptil atau kulit burung dari kegiatan perburuan atau penangkapan. Sedangkan kegiatan penangkaran satwa liar mencakup usaha penangkaran, pembesaran, penelitian untuk pelestarian satwa liar, baik satwa liar darat dan satwa liar laut seperti mamalia laut, misalnya duyung, singa laut dan anjing laut.

Kehutanan dan Penebangan Kayu

Subkategori ini meliputi kegiatan penebangan segala jenis kayu serta pengambilan daun-daunan, getah-getahan, dan akar-akaran, termasuk di sini adalah jasa yang menunjang kegiatan kehutanan berdasarkan sistem balas jasa/kontrak. Komoditas yang dihasilkan oleh kegiatan kehutanan meliputi kayu gelondongan (baik yang berasal dari hutan rimba maupun hutan budidaya), kayu bakar, rotan, bambu, dan hasil hutan lainnya. Dicakup juga dalam kegiatan kehutanan ini adalah jasa yang menunjang kegiatan kehutanan atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak, termasuk kegiatan reboisasi hutan yang dilakukan atas dasar kontrak.

Perikanan

Subkategori ini meliputi semua kegiatan penangkapan, pembenihan, dan budidaya segala jenis ikan dan biota air lainnya, baik yang berada di air tawar, air payau maupun di laut. Komoditas yang dihasilkan oleh kegiatan perikanan meliputi segala jenis ikan, crustacea, mollusca, rumput laut, dan biota air lainnya yang diperoleh dari penangkapan (di laut dan perairan umum) dan budidaya (laut, tambak, karamba, jaring apung, kolam, dan sawah). Dicakup juga dalam kegiatan perikanan ini adalah jasa yang menunjang kegiatan perikanan atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak.

Pendekatan yang digunakan dalam memperkirakan nilai tambah Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan adalah melalui pendekatan produksi. Pendekatan ini didasarkan pada pertimbangan ketersediaan data produksi dan harga untuk masing-masing komoditi pertanian.

Menurut sifatnya, output dibedakan atas dua jenis, yaitu output utama dan output ikutan. Disamping itu, komoditi lainnya yang belum dicakup diperkirakan melalui besaran persentase pelengkap yang diperoleh dari berbagai survei khusus. Penghitungan output pada kategori ini tidak hanya mencakup output utama dan ikutan pada saat panen tetapi juga ditambahkan output yang diadopsi dari implementasi SNA 2008. Untuk kegiatan yang menghasilkan komoditas yang dapat diambil hasilnya berulang kali, outputnya juga mencakup biaya perawatan yang dikeluarkan selama periode tertentu yang dinamakan dengan *Cultivated Biological Resources (CBR)*. Sedangkan untuk kegiatan yang menghasilkan komoditas semusim atau yang diambil hasilnya hanya sekali, outputnya juga mencakup biaya yang dikeluarkan untuk tanaman yang belum dipanen (*standing crops*) di akhir periode dikurangi dengan biaya yang dikeluarkan untuk tanaman yang belum dipanen (*standing crops*) di awal periode yang disebut sebagai *Work-in-Progress (WIP)*. Sehingga total output pada kategori ini merupakan penjumlahan dari nilai output utama, output ikutan, dan CBR atau WIP ditambah dengan nilai pelengkapnya.

Nilai Tambah Bruto (NTB) suatu subkategori diperoleh dari penjumlahan NTB tiap-tiap kegiatan usaha yang menghasilkan komoditas tertentu. NTB ini didapat dari pengurangan nilai output atas harga dasar dengan seluruh pengeluaran konsumsi antara. Estimasi NTB atas dasar harga konstan 2010 menggunakan metode revaluasi, yaitu mengalikan produksi di tahun berjalan dengan harga pada tahun dasar (tahun 2010) untuk mengestimasi output konstan tahun berjalan.

2.2 Pertambangan dan Penggalan

Seluruh jenis komoditi yang dicakup dalam Kategori Pertambangan dan Penggalan, dikelompokkan dalam empat subkategori, yaitu: pertambangan minyak dan gas bumi (migas), pertambangan batubara dan lignit, pertambangan bijih logam serta pertambangan dan penggalan lainnya. Adapun subkategori lapangan usaha yang aktivitasnya terdapat di kabupaten ini adalah sub kategori pertambangan dan penggalan lainnya.

Subkategori pertambangan dan penggalan lainnya mencakup penggalan dan pengambilan segala jenis barang galian seperti batu-batuan, pasir dan tanah yang pada umumnya berada pada

permukaan bumi. Hasil dari kegiatan ini adalah batu gunung, batu kali, batu kapur, koral, kerikil, batu karang, batu marmer, pasir untuk bahan bangunan, pasir silika, pasir kwarsa, kaolin, tanah liat, dan komoditi penggalian selain tersebut di atas. Termasuk dalam subkategori ini adalah komoditi garam hasil penggalian.

2.3 Industri Pengolahan

Kategori Industri Pengolahan meliputi kegiatan ekonomi di bidang perubahan secara kimia atau fisik dari bahan, unsur atau komponen menjadi produk baru. Bahan baku industri pengolahan berasal dari produk pertanian, kehutanan, perikanan, pertambangan atau penggalian seperti produk dari kegiatan industri pengolahan lainnya Perubahan, pembaharuan atau rekonstruksi yang pokok dari barang secara umum diperlakukan sebagai industri pengolahan. Unit industri pengolahan digambarkan sebagai pabrik, mesin atau peralatan yang khusus digerakkan dengan mesin dan tangan. Termasuk kategori industri pengolahan adalah perubahan bahan menjadi produk baru dengan menggunakan tangan, kegiatan maklon atau kegiatan penjualan produk yang dibuat di tempat yang sama dimana produk tersebut dijual dan unit yang melakukan pengolahan bahan-bahan dari pihak lain atas dasar kontrak.

Kategori industri pengolahan terdiri dari beberapa subkategori yaitu: Industri Pengolahan Batubara dan Pengilangan Minyak dan Gas Bumi; Industri Makanan dan Minuman; Industri Pengolahan Tembakau; Industri Tekstil dan Pakaian Jadi; Industri Kulit, Barang dari Kulit, dan Alas Kaki; Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus, dan Barang Anyaman; Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan, dan Reproduksi Media Rekam; Industri Kimia, Farmasi, dan Obat Tradisional; Industri Karet, Barang dari Karet, dan Plastik; Industri Barang Galian Bukan Logam; Industri Logam Dasar; Industri Barang Logam, Komputer, Barang Elektronik, Optik, dan Peralatan Listrik; Industri Mesin dan Perlengkapan; Industri Alat Angkutan; Industri Furnitur; Industri Pengolahan Lainnya, Jasa Reparasi, dan Pemasangan Mesin dan Peralatan.

2.4 Pengadaan Listrik dan Gas

Kategori ini mencakup kegiatan pengadaan tenaga listrik, gas alam dan buatan, uap panas, air panas, udara dingin dan produksi es dan sejenisnya melalui jaringan, saluran, atau pipa infrastruktur permanen. Dimensi jaringan/infrastruktur tidak dapat ditentukan dengan pasti, termasuk kegiatan pendistribusian listrik, gas, uap panas dan air panas serta pendinginan udara dan air untuk tujuan produksi es. Produksi es untuk kebutuhan makanan/minuman dan tujuan non makanan. Kategori ini

juga mencakup pengoperasian mesin dan gas yang menghasilkan, mengontrol dan menyalurkan tenaga listrik atau gas. Juga mencakup pengadaan uap panas dan AC. Kategori ini dapat dirinci menjadi subkategori ketenagalistrikan, pengadaan gas dan produksi es.

Subkategori ketenagalistrikan mencakup pembangkitan, pengiriman dan penyaluran tenaga listrik kepada konsumen, baik yang diselenggarakan oleh PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) maupun oleh perusahaan swasta (Non-PLN), seperti pembangkitan listrik oleh perusahaan milik Pemerintah Daerah, dan listrik yang diusahakan oleh swasta (perorangan maupun perusahaan) dengan tujuan untuk dijual. Listrik yang dibangkitkan atau diproduksi meliputi listrik yang dijual, dipakai sendiri, hilang dalam transmisi dan distribusi, dan listrik yang dicuri.

Metode penghitungan dengan menggunakan pendekatan produksi. Output atas dasar harga berlaku diperoleh melalui perkalian antara kuantum barang yang dihasilkan dengan harga dasar per unit produksi pada masing-masing tahun. Sedangkan output atas dasar harga konstan 2010 diperoleh dengan cara revaluasi, yaitu mengalikan kuantum barang yang dihasilkan pada masing-masing tahun dengan harga dasar per unit produksi pada tahun 2010. Selanjutnya untuk memperoleh NTB baik atas dasar harga berlaku maupun konstan 2010 adalah dengan mengalikan output pada masing-masing tahun dengan rasio NTB.

Data yang diperlukan adalah data produksi dan harga. Data produksi berupa listrik terjual dan listrik dibangkitkan baik oleh PLN maupun non-PLN. Sama seperti data produksi, harga juga mencakup harga penjualan dan harga pembangkitan. Baik data produksi maupun data harga, diambil dari PT. PLN setiap triwulan dan juga statistik PLN yang terbit setiap tahun. Selain itu juga diperlukan data subsidi listrik dari Kementerian Keuangan.

Kegiatan pengadaan gas mencakup pembuatan gas dan pendistribusian gas alam atau gas buatan ke konsumen melalui suatu sistem saluran pipa, dan kegiatan penjualan gas. Kegiatan Pengadaan Uap/Air Panas, Udara Dingin dan Produksi Es mencakup kegiatan produksi, pengumpulan dan pendistribusian uap dan air panas untuk pemanas, energi dan tujuan lain, produksi dan distribusi pendinginan udara, pendinginan air untuk tujuan pendinginan dan produksi es, termasuk es untuk kebutuhan makanan/ minuman dan tujuan non makanan.

Metode penghitungan seri 2010 dengan menggunakan pendekatan produksi. Output atas dasar harga berlaku diperoleh melalui perkalian antara kuantum barang yang dihasilkan dengan harga per unit produksi pada masing-masing tahun. Sedangkan output atas dasar harga konstan 2010 diperoleh dengan cara revaluasi, yaitu mengalikan kuantum barang yang dihasilkan pada masing-

masing tahun dengan harga per unit produksi pada tahun 2010. Selanjutnya untuk memperoleh NTB baik atas dasar harga berlaku maupun konstan 2010 adalah dengan mengalikan output pada masing-masing tahun dengan rasio NTB.

2.5 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, dan Daur Ulang

Kategori ini mencakup kegiatan ekonomi/kategori yang berhubungan dengan pengelolaan berbagai bentuk limbah/sampah, seperti limbah/sampah padat atau bukan baik rumah tangga ataupun industri, yang dapat mencemari lingkungan. Hasil dari proses pengelolaan limbah sampah atau kotoran ini dibuang atau menjadi input dalam proses produksi lainnya. Kegiatan pengadaan air termasuk kategori ini, karena kegiatan ini sering kali dilakukan dalam hubungannya dengan atau oleh unit yang terlibat dalam pengelolaan limbah/kotoran.

Metode penghitungan Nilai Tambah Bruto untuk pengadaan air tahun dasar 2010 menggunakan pendekatan produksi. Output atas dasar harga berlaku diperoleh melalui perkalian antara kuantum barang yang dihasilkan dengan harga per unit produksi pada masing-masing tahun. Dan untuk data harga yang tidak tersedia pada tahun terakhir diperkirakan dengan kenaikan laju IHK komponen bahan bakar, penerangan dan air bersih. Sedangkan output atas dasar harga konstan 2010 diperoleh dengan cara revaluasi, yaitu mengalikan kuantum barang yang dihasilkan pada masing-masing tahun dengan harga per unit produksi pada tahun 2010. Selanjutnya untuk memperoleh NTB baik atas dasar harga berlaku maupun konstan 2010 adalah dengan mengalikan output pada masing-masing tahun dengan rasio NTB.

2.6 Konstruksi

Kategori Konstruksi adalah kegiatan usaha di bidang konstruksi umum dan konstruksi khusus pekerjaan gedung dan bangunan sipil, baik digunakan sebagai tempat tinggal atau sarana kegiatan lainnya. Kegiatan konstruksi mencakup pekerjaan baru, perbaikan, penambahan dan perubahan, pendirian prafabrikasi bangunan atau struktur di lokasi proyek dan juga konstruksi yang bersifat sementara. Kegiatan konstruksi dilakukan baik oleh kontraktor umum, yaitu perusahaan yang melakukan pekerjaan konstruksi untuk pihak lain, maupun oleh kontraktor khusus, yaitu unit usaha atau individu yang melakukan kegiatan konstruksi untuk dipakai sendiri.

Hasil kegiatan konstruksi antara lain: Konstruksi gedung tempat tinggal; Konstruksi gedung bukan tempat tinggal; Konstruksi bangunan sipil, misal: jalan, tol, jembatan, landasan pesawat terbang, jalan rel dan jembatan kereta api, terowongan, bendungan, waduk, menara air, jaringan

irigasi, drainase, sanitasi, tanggul pengendali banjir, terminal, stasiun, parkir, dermaga, pergudangan, pelabuhan, bandara, dan sejenisnya; Konstruksi bangunan elektrik dan telekomunikasi: pembangkit tenaga listrik; transmisi, distribusi dan bangunan jaringan komunikasi, dan sebagainya; Instalasi gedung dan bangunan sipil: instalasi listrik termasuk alat pendingin dan pemanas ruangan, instalasi gas, instalasi air bersih dan air limbah serta saluran drainase, dan sejenisnya; Pengerukan: meliputi pengerukan sungai, rawa, danau dan alur pelayaran, kolam dan kanal pelabuhan baik bersifat pekerjaan ringan, sedang maupun berat; Penyiapan lahan untuk pekerjaan konstruksi, termasuk pembongkaran dan penghancuran gedung atau bangunan lainnya serta pembersihannya; Penyelesaian konstruksi sipil seperti pemasangan kaca dan aluminium; pengerjaan lantai, dinding dan plafon gedung; pengecatan; pengerjaan interior dan dekorasi dalam penyelesaian akhir; pengerjaan eksterior dan pertamanan pada gedung dan bangunan sipil lainnya; Penyewaan alat konstruksi dengan operatornya seperti derek lori, molen, bulldoser, alat pencampur beton, mesin pancang, dan sejenisnya.

Metode yang digunakan untuk memperkirakan Output harga berlaku adalah metode ekstrapolasi dengan indeks konstruksi harga berlaku sebagai ekstrapolatornya. Untuk mendapatkan Output harga konstan, Output harga berlaku dideflasi dengan menggunakan IHPB konstruksi sebagai deflator. Sementara konsumsi antara didapat dengan menggunakan metode *commodity flow* beberapa komoditas utama dari konsumsi antara, misalnya produksi semen, kayu, juga bahan galian. NTB berlaku didapat dari nilai output berlaku dikurangi dengan biaya antara berlaku. Sementara NTB konstan didapat dari mengalikan output konstan dengan rasio NTB tahun dasar 2010.

2.7 Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

Kategori ini meliputi kegiatan ekonomi/kategori di bidang perdagangan besar dan eceran (yaitu penjualan tanpa perubahan teknis) dari berbagai jenis barang, dan memberikan imbalan jasa yang mengiringi penjualan barang-barang tersebut. Baik penjualan secara grosir (perdagangan besar) maupun eceran merupakan tahap akhir dalam pendistribusian barang dagangan. Kategori ini juga mencakup reparasi mobil dan sepeda motor.

Penjualan tanpa perubahan teknis juga mengikuti kegiatan yang terkait dengan perdagangan, seperti penyortiran, pemisahan kualitas dan penyusunan barang, pencampuran, pembotolan, pengepakan, pembongkaran dari ukuran besar dan pengepakan ulang menjadi ukuran

yang lebih kecil, penggudangan, baik dengan pendingin maupun tidak, pembersihan dan pengeringan hasil pertanian, pemotongan lembaran kayu atau logam.

Pedagang besar seringkali secara fisik mengumpulkan, menyortir, dan memisahkan kualitas barang dalam ukuran besar, membongkar dari ukuran besar dan mengepak ulang menjadi ukuran yang lebih kecil. Sedangkan pedagang eceran melakukan penjualan kembali barang-barang (tanpa perubahan teknis), baik barang baru maupun bekas, utamanya kepada masyarakat umum untuk konsumsi atau penggunaan perorangan maupun rumah tangga, melalui toko, departement store, kios, mail-order houses, penjual dari pintu ke pintu, pedagang keliling, koperasi konsumsi, rumah pelelangan, dan lain-lain. Pada umumnya pedagang pengecer memperoleh hak atas barang-barang yang dijualnya, tetapi beberapa pedagang pengecer bertindak sebagai agen, dan menjual atas dasar konsinyasi atau komisi.

Output kategori perdagangan adalah margin perdagangan, yaitu nilai jual dikurangi nilai beli barang yang diperdagangkan setelah dikurangi biaya angkutan yang dikeluarkan oleh pedagang. Output perdagangan (berlaku/konstan) dihitung menggunakan metode tidak langsung, yaitu menggunakan metode pendekatan arus barang "*commodity flow approach*". Margin perdagangan diperoleh dengan mengalikan rasio margin perdagangan dengan output barang yang dihasilkan oleh industri penghasil barang domestik ditambah impor barang dari luar negeri. Kemudian output atau margin perdagangan tersebut dikalikan dengan rasio nilai tambah untuk memperoleh nilai tambah perdagangan. Sedangkan reparasi mobil dan sepeda motor dihitung dengan pendekatan produksi, dengan indikator produksinya adalah jumlah kendaraan. Untuk mendapatkan nilai tambah konstannya nilai tambah berlaku yang diperoleh di-deflate menggunakan IHK umum (BPS).

2.8 Transportasi dan Pergudangan

Kategori ini mencakup penyediaan angkutan penumpang atau barang, baik yang berjadwal maupun tidak, dengan menggunakan rel, saluran pipa, jalan darat, air atau udara dan kegiatan yang berhubungan dengan pengangkutan. Kategori Transportasi dan Pergudangan terdiri atas: angkutan rel; angkutan darat; angkutan laut; angkutan sungai, danau dan penyeberangan; angkutan udara; pergudangan dan jasa penunjang angkutan, pos dan kurir. Kegiatan pengangkutan meliputi kegiatan pemindahan penumpang dan barang dari suatu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan alat angkut atau kendaraan, baik bermotor maupun tidak bermotor. Sedangkan jasa penunjang angkutan

mencakup kegiatan yang sifatnya menunjang kegiatan pengangkutan seperti: terminal, pelabuhan, pergudangan, dan lain-lain.

Metode estimasi yang digunakan untuk kegiatan angkutan secara umum adalah pendekatan produksi. Output atas dasar harga berlaku merupakan perkalian antara indikator produksi (jumlah kendaraan wajib uji, dan jumlah penumpang, barang dan kendaraan yang diangkut) dengan indikator harga (rata-rata output untuk masing-masing jenis alat angkutan). Sedangkan output atas dasar harga konstan 2010 diperoleh dengan menggunakan metode ekstrapolasi dengan indeks jumlah kendaraan, produksi rata-rata tertimbang jumlah penumpang, barang dan kendaraan yang diangkut sebagai ekstrapolatornya. NTB dihitung berdasarkan perkalian antara rasio NTB dengan outputnya.

Metode estimasi yang digunakan untuk jasa penunjang angkutan, pergudangan dan kurir adalah pendekatan produksi. Nilai output dan NTB atas dasar harga berlaku dari hasil pengolahan data pendapatan dan pengeluaran/biaya dari laporan rugi/laba perusahaan yang bergerak di bidang jasa penunjang angkutan, pergudangan dan kurir. Sedangkan output atas dasar harga konstan 2010 dihitung dengan metode deflasi, yaitu dengan membagi nilai output atas dasar berlaku dengan indeks harga tahun dasar 2010. Nilai NTB atas dasar harga konstan diperoleh dengan mengalikan output atas dasar harga konstan dengan rasio NTB tahun dasar 2010.

2.9 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

Kategori ini mencakup penyediaan akomodasi penginapan jangka pendek untuk pengunjung dan pelancong lainnya serta penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi segera. Jumlah dan jenis layanan tambahan yang disediakan sangat bervariasi. Tidak termasuk penyediaan akomodasi jangka panjang seperti tempat tinggal utama, penyiapan makanan atau minuman bukan untuk dikonsumsi segera atau yang melalui kegiatan perdagangan besar dan eceran.

Kegiatan penyediaan akomodasi mencakup kegiatan penyediaan akomodasi jangka pendek untuk pengunjung atau pelancong lainnya. Termasuk penyediaan akomodasi yang lebih lama untuk pelajar, pekerja, dan sejenisnya (seperti asrama atau rumah kost dengan makan maupun tidak dengan makan). Penyediaan akomodasi dapat hanya menyediakan fasilitas akomodasi saja atau dengan makanan dan minuman dan/atau fasilitas rekreasi. Yang dimaksud akomodasi jangka pendek seperti hotel berbintang maupun tidak berbintang, serta tempat tinggal lainnya yang digunakan untuk menginap seperti losmen, motel, dan sejenisnya. Termasuk pula kegiatan penyediaan makanan

dan minuman serta penyediaan fasilitas lainnya bagi para tamu yang menginap selama kegiatan tersebut berada dalam satu kesatuan manajemen dengan penginapan, alasan penggabungan ini karena datanya sulit dipisahkan.

NTB kegiatan akomodasi diperoleh dengan menggunakan pendekatan produksi. Indikator produksi yang digunakan adalah jumlah malam kamar terjual dan indikator harganya adalah rata-rata tarif per malam kamar. Output atas dasar harga berlaku diperoleh dari hasil perkalian antara indikator produksi dengan indikator harganya. Sedangkan NTB atas dasar harga konstan diperoleh berdasarkan perkalian output dengan rasio NTB. Output dan NTB atas dasar harga konstan dihitung dengan menggunakan metode revaluasi.

Kegiatan Penyediaan makan dan minum mencakup pelayanan makan minum yang menyediakan makanan atau minuman untuk dikonsumsi segera, baik restoran tradisional, restoran *self service* atau restoran *take away*, baik di tempat tetap maupun sementara dengan atau tanpa tempat duduk. Yang dimaksud penyediaan makanan dan minuman adalah penyediaan makanan dan minuman untuk dikonsumsi segera berdasarkan pemesanan.

Pendekatan yang digunakan untuk menghitung NTB kegiatan penyediaan makan dan minum yaitu melalui pendekatan produksi. Indikator produksinya berupa jumlah penduduk pertengahan tahun, dan indikator harganya berupa pengeluaran rata-rata per kapita atas makan minum jadi di luar rumah. Hasil perkalian kedua indikator tersebut diperoleh output atas dasar harga berlaku. Sedangkan, output atas dasar harga konstan dihitung dengan menggunakan metode deflasi, dengan IHK kelompok makanan jadi, minuman, dan rokok sebagai deflator. Dan NTB atas dasar harga berlaku maupun konstan diperoleh berdasarkan perkalian output dengan rasio NTB.

2.10 Informasi dan Komunikasi

Kategori ini mencakup produksi dan distribusi informasi dan produk kebudayaan, persediaan alat untuk mengirimkan atau mendistribusikan produk-produk ini dan juga data atau kegiatan komunikasi, informasi, teknologi informasi dan pengolahan data serta kegiatan jasa informasi lainnya. Kategori terdiri dari beberapa industri yaitu Penerbitan, Produksi Gambar Bergerak, Video, Perekaman Suara dan Penerbitan Musik, Penyiaran dan Pemrograman (Radio dan Televisi), Telekomunikasi, Pemrograman, Konsultasi Komputer dan Teknologi Informasi.

Kegiatan industri penerbitan mencakup penerbitan buku, brosur, leaflet, kamus, ensiklopedia, atlas, peta dan grafik, penerbitan surat kabar, jurnal dan majalah atau tabloid, termasuk penerbitan piranti lunak. Semua bentuk penerbitan (cetakan, elektronik atau audio, pada internet, sebagai produk multimedia seperti cd rom buku referensi dan lain-lain).

Kegiatan industri produksi gambar bergerak, video, perekaman suara dan penerbitan musik ini mencakup pembuatan gambar bergerak baik pada film, video tape atau disk untuk diputar dalam bioskop atau untuk siaran televisi, kegiatan penunjang seperti editing, cutting, dubbing film dan lain-lain, pendistribusian dan pemutaran gambar bergerak dan produksi film lainnya untuk industri lain. Pembelian dan penjualan hak distribusi gambar bergerak dan produksi film lainnya. Selain itu juga mencakup kegiatan perekaman suara, yaitu produksi perekaman master suara asli, merilis, mempromosikan dan mendistribusikannya, penerbitan musik seperti kegiatan jasa perekaman suara dalam studio atau tempat lain.

Kegiatan industri penyiaran dan pemrograman (radio dan televisi) ini mencakup pembuatan isi siaran atau perolehan hak untuk menyalurkannya dan kemudian menyiarkannya, seperti radio, televisi dan program hiburan, berita, perbincangan dan sejenisnya. Juga termasuk penyiaran data, khususnya yang terintegrasi dengan penyiaran radio atau TV.

Kegiatan industri telekomunikasi ini mencakup kegiatan penyediaan telekomunikasi dan kegiatan jasa yaitu pemancar suara, data, naskah, bunyi dan video. Fasilitas transmisi yang melakukan kegiatan ini dapat berdasar pada teknologi tunggal atau kombinasi dari berbagai teknologi. Umumnya kegiatan ini adalah transmisi dari isi, tanpa terlibat dalam proses pembuatannya.

Kegiatan industri pemrograman, konsultasi komputer dan teknologi informasi ini mencakup kegiatan penyediaan jasa keahlian di bidang teknologi informasi, seperti penulisan, modifikasi, pengujian dan pendukung piranti lunak; perencanaan dan perancangan sistem komputer yang mengintegrasikan perangkat keras komputer, piranti lunak komputer dan teknologi komunikasi; manajemen dan pengoperasian sistem komputer klien dan/atau fasilitas pengolahan data di tempat klien serta kegiatan profesional lainnya dan kegiatan yang berhubungan dengan teknis komputer.

Metode estimasi yang digunakan adalah pendekatan produksi. Output atas dasar harga berlaku didapat dari nilai produksi/pendapatan hasil olahan survei industri besar dan sedang, dan survei khusus triwulanan neraca produksi, serta laporan keuangan perusahaan-perusahaan swasta

non-finansial yang bergerak di industri informasi dan telekomunikasi. Sementara itu, NTB atas dasar harga berlaku didapat dari penjumlahan upah dan gaji, laba/rugi, penyusutan, dan komponen-komponen lainnya. Sedangkan output atas dasar harga konstan 2010 diperoleh dengan metode deflasi, dan NTB atas dasar harga konstan didapat dari perkalian antara output atas dasar harga konstan dengan rasio NTB tahun dasar 2010.

2.11 Jasa Keuangan dan Asuransi

Kategori ini mencakup jasa perantara keuangan, asuransi dan pensiun, jasa keuangan lainnya serta jasa penunjang keuangan. Kategori ini juga mencakup kegiatan pemegang asset, seperti kegiatan perusahaan holding dan kegiatan dari lembaga penjaminan atau pendanaan dan lembaga keuangan sejenis.

Kegiatan jasa perantara keuangan mencakup kegiatan yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit/pinjaman dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak, seperti: menerima simpanan dalam bentuk giro dan deposito, memberikan kredit/pinjaman baik kredit jangka pendek/menengah dan panjang. Kegiatan tersebut dilakukan oleh perbankan konvensional maupun syariah, bank swasta nasional, bank campuran dan asing, dan bank perkreditan rakyat, juga koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam, baitul maal wantanwil dan jasa perantara moneter lainnya. Sementara itu Kegiatan asuransi dan reasuransi adalah salah satu jenis lembaga keuangan bukan bank yang usaha pokoknya menanggung resiko-resiko atas terjadinya musibah/kecelakaan terhadap barang atau orang, termasuk tunjangan hari tua. Pihak tertanggung dapat menerima biaya atas hancur/rusaknya barang atau karena terjadinya kematian pihak tertanggung. Golongan ini mencakup kegiatan asuransi jiwa, asuransi non jiwa dan reasuransi, baik konvensional maupun dengan prinsip syariah.

Metode estimasi yang digunakan untuk jasa perantara keuangan dan asuransi adalah pendekatan produksi. Output atas dasar harga berlaku dari usaha perantara keuangan adalah jumlah penerimaan atas jasa pelayanan bank atau koperasi yang diberikan kepada pemakainya, seperti biaya administrasi atas transaksi, dan imputasi jasa implisit bank atau koperasi yang diukur dengan menggunakan metode FISIM, juga pendapatan lainnya yang diperoleh karena melakukan kegiatan pendukung, seperti: mengirim uang, membeli dan menjual surat-surat berharga. Output dari kegiatan asuransi dan reasuransi merupakan penjumlahan dari hasil *underwriting*, hasil investasi,

dan pendapatan lainnya. Penghitungan NTB untuk jasa perantara keuangan atas dasar harga konstan 2010 dilakukan dengan menggunakan metode deflasi dan sebagai deflatornya adalah IHK Umum dan Indeks Implisit PDRB tanpa Jasa Perantara Keuangan. Sementara itu, NTB kegiatan asuransi baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan diperoleh dari hasil perkalian output dan rasio NTB.

Lembaga dana pensiun adalah lembaga berbadan hukum yang mengelola program yang menjanjikan manfaat pensiun. Manfaat pensiun adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara berkala atau sekaligus pada masa pensiun sebagai santunan hari tua/uang pensiun. Metode estimasi yang digunakan dalam menghitung output dana pensiun atas dasar harga berlaku adalah pendekatan produksi. Output dari kegiatan dana pensiun merupakan hasil pengolahan laporan keuangan kegiatan tersebut. Sedangkan output atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan metode deflasi, dimana Indeks Harga Konsumen (IHK) umum digunakan sebagai deflator. Nilai Tambah Bruto (NTB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan diperoleh dari hasil perkalian output dan rasio NTB.

Jasa keuangan lainnya mencakup kegiatan *leasing*, kegiatan pemberian pinjaman oleh lembaga yang tidak tercakup dalam perantara keuangan, serta kegiatan pendistribusian dana bukan dalam bentuk pinjaman. Subkategori ini mencakup kegiatan sewa guna usaha dengan hak opsi, pegadaian, pembiayaan konsumen, pembiayaan kartu kredit, modal ventura, anjak piutang, dan jasa keuangan lainnya. Metode estimasi yang digunakan untuk menghitung output atas dasar harga berlaku adalah pendekatan produksi. Output dari jasa keuangan lainnya merupakan hasil pengolahan laporan keuangan perusahaan yang terdiri dari pendapatan sewa modal, pendapatan administrasi, dan pendapatan lainnya. Sedangkan output atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan metode deflasi, dimana Indeks Harga Konsumen (IHK) umum digunakan sebagai deflator. Nilai Tambah Bruto baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan diperoleh dari hasil perkalian output dan rasio NTB.

Jasa penunjang keuangan meliputi kegiatan yang menyediakan jasa yang berhubungan erat dengan aktivitas jasa keuangan, asuransi, dan dana pensiun. Subkategori ini mencakup kegiatan administrasi pasar uang (bursa efek), manager investasi, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, wali amanat, jasa penukaran mata uang, jasa broker asuransi dan reasuransi, dan kegiatan penunjang jasa keuangan, asuransi dan dana pensiun lainnya. Metode

estimasi yang digunakan dalam menghitung output atas dasar harga berlaku adalah pendekatan produksi. Output dari kegiatan perusahaan jasa penunjang keuangan merupakan hasil pengolahan laporan keuangan perusahaan yang terdiri dari pendapatan jasa transaksi efek, jasa pencatatan, jasa informasi, dan pendapatan lainnya. Sedangkan output atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan metode deflasi, dimana Indeks Harga Konsumen (IHK) umum digunakan sebagai deflator. Nilai Tambah Bruto (NTB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan diperoleh dari hasil perkalian output dan rasio NTB.

2.12 Real Estat

Kategori ini meliputi kegiatan persewaan, agen dan atau perantara dalam penjualan atau pembelian real estat serta penyediaan jasa real estat lainnya bisa dilakukan atas milik sendiri atau milik orang lain yang dilakukan atas dasar balas jasa kontrak. Kategori ini juga mencakup kegiatan pembangunan gedung, pemeliharaan atau penyewaan bangunan. Real estat adalah property berupa tanah dan bangunan.

Output untuk persewaan bangunan tempat tinggal diperoleh dari perkalian antara pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita untuk sewa rumah, kontrak rumah, sewa beli rumah dinas, perkiraan sewa rumah, pajak dan pemeliharaan rumah dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Sedangkan output usaha persewaan bangunan bukan tempat tinggal diperoleh dari perkalian antara luas bangunan yang disewakan dengan rata-rata tarif sewa per m². NTB diperoleh dari hasil perkalian antara rasio NTB dengan outputnya. NTB atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan metode ekstrapolasi dan sebagai ekstrapolatornya indeks luas bangunan.

2.13 Jasa Perusahaan

Kategori Jasa Perusahaan merupakan gabungan dari 2 (dua) kategori, yakni kategori M dan kategori N. Kategori M mencakup kegiatan profesional, ilmu pengetahuan dan teknik yang membutuhkan tingkat pelatihan yang tinggi dan menghasilkan ilmu pengetahuan dan ketrampilan khusus yang tersedia untuk pengguna. Kegiatan yang termasuk kategori M antara lain: jasa hukum dan akuntansi, jasa arsitektur dan teknik sipil, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, periklanan dan penelitian pasar, serta jasa profesional, ilmiah dan teknis lainnya. Kategori N mencakup berbagai kegiatan yang mendukung operasional usaha secara umum. Kegiatan yang

termasuk kategori N antara lain: jasa persewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, jasa ketenagakerjaan, jasa agen perjalanan, penyelenggaraan tur dan jasa reservasi lainnya, jasa keamanan dan penyelidikan, jasa untuk gedung dan pertamanan, jasa administrasi kantor, serta jasa penunjang kantor dan jasa penunjang usaha lainnya.

Metode estimasi yang digunakan untuk menghitung output kategori jasa perusahaan atas dasar harga berlaku adalah pendekatan produksi. Output diperoleh dari hasil perkalian antara jumlah tenaga kerja dengan rata-rata output per tenaga kerja. Sedangkan output atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan metode revaluasi. Nilai Tambah Bruto (NTB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan diperoleh dari hasil perkalian output dan rasio NTB.

2.14 Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib

Kategori ini mencakup kegiatan yang sifatnya pemerintahan, yang umumnya dilakukan oleh administrasi pemerintahan. Kategori ini juga mencakup perundang-undangan dan penterjemahan hukum yang berkaitan dengan pengadilan dan menurut peraturannya, seperti halnya administrasi program berdasarkan peraturan perundang-undangan, kegiatan legislative, perpajakan, pertahanan Negara, keamanan dan keselamatan Negara, pelayanan imigrasi, hubungan luar negeri dan administrasi program pemerintah, serta jaminan sosial wajib. Kegiatan yang diklasifikasikan di kategori lain dalam KBLI tidak termasuk pada kategori ini, meskipun dilakukan oleh Badan pemerintahan. Sebagai contoh administrasi sistem sekolah, (peraturan, pemeriksaan, dan kurikulum) termasuk pada kategori ini, tetapi pengajaran itu sendiri masuk kategori Pendidikan (P) dan rumah sakit penjara atau militer diklasifikasikan pada kategori Q.

NTB administrasi pemerintahan atas dasar harga berlaku merupakan penjumlahan seluruh belanja pegawai dari kegiatan administrasi pemerintahan dan pertahanan serta jasa pemerintahan lainnya ditambah dengan penyusutan. Perkiraan NTB atas dasar harga konstan 2010 dihitung dengan cara ekstrapolasi. Dan indeks tertimbang jumlah pegawai negeri sipil menurut golongan kepangkatan sebagai ekstrapolatornya.

2.15 Jasa Pendidikan

Kategori ini mencakup kegiatan pendidikan pada berbagai tingkatan dan untuk berbagai pekerjaan, baik secara lisan atau tertulis seperti halnya dengan berbagai cara komunikasi. Kategori ini

juga mencakup pendidikan negeri dan swasta juga mencakup pengajaran yang terutama mengenai kegiatan olahraga, hiburan dan penunjang pendidikan. Pendidikan dapat disediakan dalam ruangan, melalui penyiaran radio dan televisi, internet dan surat menyurat. Tingkat pendidikan dikelompokkan seperti kegiatan pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi dan pendidikan lain, mencakup juga jasa penunjang pendidikan dan pendidikan anak usia dini.

Penghitungan NTB Jasa Pendidikan Pemerintah atas dasar harga berlaku menggunakan pendekatan pengeluaran, dan untuk Jasa Pendidikan Swasta menggunakan pendekatan produksi. Untuk NTB Jasa Pendidikan Pemerintah atas dasar harga konstan 2010 menggunakan pendekatan deflasi, sedangkan Jasa Pendidikan Swasta menggunakan pendekatan revaluasi.

2.16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

Kategori ini mencakup kegiatan penyediaan jasa kesehatan dan kegiatan sosial yang cukup luas cakupannya, dimulai dari pelayanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga profesional terlatih di rumah sakit dan fasilitas kesehatan lain sampai kegiatan perawatan di rumah yang melibatkan tingkatan kegiatan pelayanan kesehatan sampai kegiatan sosial yang tidak melibatkan tenaga kesehatan profesional. Kegiatan penyediaan jasa kesehatan dan kegiatan sosial mencakup: Jasa Rumah Sakit; Jasa Klinik; Jasa Rumah Sakit Lainnya; Praktik Dokter; Jasa Pelayanan Kesehatan yang dilakukan oleh Paramedis; Jasa Pelayanan Kesehatan Tradisional; Jasa Pelayanan Penunjang Kesehatan; Jasa Angkutan Khusus Pengangkutan Orang Sakit (Medical Evacuation); Jasa Kesehatan Hewan; Jasa Kegiatan Sosial.

Metode penghitungan untuk jasa pemerintah atas dasar harga berlaku menggunakan pendekatan pengeluaran, sedangkan swasta menggunakan pendekatan produksi. NTB jasa kesehatan dan kegiatan sosial pemerintah atas dasar harga konstan 2010 menggunakan pendekatan deflasi, sedangkan jasa kesehatan dan kegiatan sosial swasta menggunakan pendekatan revaluasi.

2.17 Jasa Lainnya

Kategori Jasa Lainnya merupakan gabungan 4 kategori pada KBLI 2009. Kategori ini mempunyai kegiatan yang cukup luas yang meliputi: Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi; Jasa Reparasi Komputer Dan Barang Keperluan Pribadi Dan Perlengkapan Rumah Tangga; Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga; Kegiatan Yang Menghasilkan Barang dan Jasa Oleh Rumah Tangga Yang

Digunakan Sendiri untuk memenuhi kebutuhan; Jasa Swasta Lainnya termasuk Kegiatan Badan Internasional, seperti PBB dan perwakilan PBB, Badan Regional, IMF, OECD, dan lain-lain.

Kesenian, Hiburan dan Rekreasi

Jasa Kesenian, Hiburan dan Rekreasi berkategori R meliputi kegiatan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat umum akan hiburan, kesenian, dan kreativitas, termasuk perpustakaan, arsip, museum, kegiatan kebudayaan lainnya, kegiatan perjudian dan pertaruhan, serta kegiatan olahraga dan rekreasi lainnya. Output atas dasar harga berlaku diperoleh dengan menggunakan metode pendekatan produksi, yaitu output diperoleh dari hasil perkalian antara indikator produksi dengan indikator harga. Output panggung hiburan/kesenian dihitung berdasarkan pajak tontonan yang diterima pemerintah. Output untuk jasa hiburan dan rekreasi lainnya pada umumnya didasarkan pada hasil perkalian antara jumlah perusahaan dan jumlah tenaga kerja masing-masing dengan rata-rata output per indikatornya. NTB atas dasar harga berlaku diperoleh dari hasil perkalian antara rasio NTB dengan output. Sedangkan output dan NTB atas dasar harga konstan menggunakan metode deflasi/ ekstrapolasi dengan deflator/ekstrapolatornya adalah IHK rekreasi dan olahraga/indeks indikator produksi yang sesuai.

Kegiatan Jasa Lainnya

Kegiatan ini berkategori S yang mencakup kegiatan dari keanggotaan organisasi, jasa reparasi komputer dan barang keperluan pribadi dan perlengkapan rumah tangga, serta berbagai kegiatan jasa perorangan lainnya. Output atas dasar harga berlaku diperoleh dari perkalian antara masing-masing jumlah tenaga kerja dengan rata-rata output per tenaga kerja. NTB atas dasar harga berlaku diperoleh dari hasil perkalian antara rasio NTB dengan output. Sedangkan untuk memperoleh output dan NTB atas dasar harga konstan menggunakan metode deflasi dimana deflatornya adalah IHK Umum.

Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga; Kegiatan yang Menghasilkan Barang dan Jasa oleh Rumah Tangga yang Digunakan Sendiri untuk Memenuhi Kebutuhan

Kegiatan ini berkategori T mencakup kegiatan yang memanfaatkan jasa perorangan untuk melayani rumah tangga yang didalamnya termasuk jasa pekerja domestik (pembantu rumah tangga, satpam, tukang kebun, supir, dan sejenisnya), dan Kegiatan Yang Menghasilkan Barang Dan Jasa Oleh

Rumah Tangga Yang Digunakan Sendiri Untuk Memenuhi Kebutuhan (didalamnya termasuk kegiatan pertanian, industri, penggalian, konstruksi, dan pengadaan air).

Output atas dasar harga berlaku untuk jasa perorangan yang melayani rumah tangga/ jasa pekerja domestik (pembantu rumah tangga, satpam, tukang kebun, supir, dan sejenisnya) diperoleh dari perkalian antara pengeluaran perkapita untuk jasa pekerja domestik dengan jumlah penduduk pertengahan tahun, sedangkan NTB-nya sama dengan output yang dihasilkan karena konsumsi antara pekerja jasa domestik merupakan pengeluaran konsumsi rumah tangga majikan. Output dan NTB atas dasar harga berlaku diperoleh dengan hasil survei intern BPS (SKTIR). Sedangkan output pengadaan air diperoleh dengan pendekatan rumah tangga yang menggunakan pompa dan sumur, baik sumur terlindung maupun tidak terlindung. Sementara itu, output dan NTB atas dasar harga konstan, baik untuk kegiatan pekerja domestik maupun kegiatan menghasilkan barang dan jasa untuk digunakan sendiri oleh rumah tangga diperoleh dengan menggunakan metode deflasi dengan deflatornya laju IHK umum.

Kegiatan Badan Internasional dan Ekstra Internasional Lainnya

Kategori U yang mencakup kegiatan badan internasional, seperti PBB dan perwakilannya, Badan Regional dan lain-lain, termasuk The Internasional Moneter Fund, The World Bank, The World Health Organization (WHO), the Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), the Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC) dan lain-lain. Output dan NTB harga berlaku diperoleh dengan pendekatan biaya yang didapatkan dari laporan keuangan badan internasional dan ekstra internasional lainnya. Sementara, untuk output konstan diperoleh dengan metode deflasi dengan deflator laju IHK umum.

2.18 Metode Analisis Kesenjangan Ekonomi

Metode analisis kesenjangan ekonomi regional dapat ditunjukkan berdasarkan perhitungan disparitas PDRB Perkapita antarwilayah, perhitungan yang digunakan dalam analisis kesenjangan ekonomi antarwilayah adalah Indeks Williamson (CVw). Indeks Williamson ini sederhana dan populer digunakan untuk mengukur kesenjangan ekonomi regional, khususnya pendapatan dalam pengertian indikator PDRB per kapita.

- **PDRB per Kapita**

PDRB per kapita adalah perhitungan PDRB di suatu wilayah dibagi dengan jumlah penduduk wilayah tersebut. Formulasi untuk menghitung PDRB per kapita adalah:

$$\text{PDRB Per Kapita} = \frac{\text{Nilai PDRB Kecamatan}}{\text{Jumlah Penduduk Kecamatan}}$$

- **Indeks Williamson (CVw)**

Indeks Williamson merupakan pendekatan untuk mengukur derajat kesenjangan antar wilayah berdasarkan PDRB perkapita. Formula ini pada dasarnya sama dengan *coefficient of variation (CV)* biasa dimana standar deviasi dibagi dengan rata-rata. Williamson (1965) memperkenalkan CV ini dengan menimbanginya dengan proporsi penduduk, yang disebut CVw. Formulanya adalah sebagai berikut:

$$\text{Indeks Williamson (CVw)} = \frac{\sqrt{\sum_i (Y_i - \bar{Y})^2 \frac{n_i}{n}}}{\bar{Y}}$$

Dimana:

CVw = *Weighted coefficient of variation* (Indeks Williamson)

n_i = Jumlah Penduduk di wilayah i

n = Jumlah Penduduk seluruh wilayah

Y_i = PDRB perkapita di wilayah i

$\bar{Y}$ = Rata-rata PDRB per kapita untuk seluruh wilayah

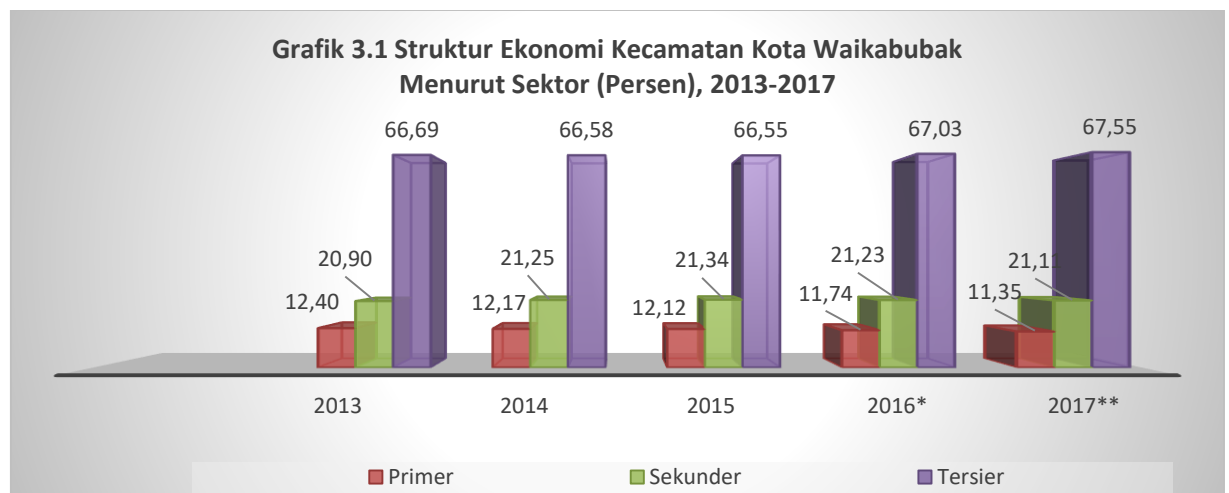
BAB III.

TINJAUAN EKONOMI KECAMATAN KOTA WAIKABUBAK

3.1 Struktur Ekonomi

Struktur ekonomi masyarakat Kecamatan Kota Waikabubak secara bertahap telah mengalami pergeseran dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier yang terlihat dari besarnya kontribusi masing-masing kategori ini terhadap pembentukan PDRB Kecamatan Kota Waikabubak. Sektor primer adalah sektor ekonomi yang memanfaatkan sumber daya alam secara langsung, yaitu mencakup kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan serta kategori pertambangan dan penggalian. Sektor sekunder adalah sektor ekonomi yang mengolah hasil sektor primer, yaitu mencakup kategori industri pengolahan hingga konstruksi. Sektor tersier adalah sektor ekonomi yang berupa jasa, yaitu mencakup perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor hingga jasa lainnya.

Pada tahun 2017, kontribusi sektor primer dalam perekonomian kecamatan kota waikabubak sebesar 11,35 persen. Peranan sektor primer ini sedikit mengalami penurunan dibandingkan tahun 2016 yang mencapai 11,74 persen. Penurunan peranan sektor primer tersebut disebabkan oleh peningkatan peranan sektor sekunder dan tersier dalam perekonomian kecamatan kota waikabubak. Hal ini menunjukkan telah terjadi transformasi struktur ekonomi secara bertahap di kecamatan kota waikabubak seperti yang digambarkan pada grafik di bawah. Peranan setiap kategori terhadap PDRB kecamatan kota waikabubak digambarkan dalam tabel 3.1.



Tabel 3.1**Peranan PDRB Menurut Lapangan Usaha (persen), 2013-2017**

	Kategori	2013	2014	2015	2016*	2017**
	(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	12,33	12,10	12,05	11,67	11,28
B	Pertambangan dan Penggalian	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
C	Industri Pengolahan	18,72	19,01	19,04	18,80	18,61
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,58	0,62	0,64	0,70	0,72
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
F	Konstruksi	1,57	1,59	1,62	1,69	1,74
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	17,78	18,09	18,36	18,55	18,72
H	Transportasi dan Pergudangan	1,85	1,80	1,82	1,88	1,91
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,79	0,83	0,86	0,87	0,87
J	Informasi dan Komunikasi	1,19	1,15	1,11	1,09	1,10
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,68	3,75	3,70	3,70	3,84
L	Real Estat	1,03	1,07	1,10	1,14	1,20
M,N	Jasa Perusahaan	0,14	0,14	0,15	0,15	0,16
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	30,05	29,61	29,36	29,65	29,77
P	Jasa Pendidikan	1,97	2,04	2,18	2,31	2,48
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,78	1,82	1,84	1,90	1,97
R,S,T,U	Jasa lainnya	6,45	6,28	6,08	5,79	5,53
Produk Domestik Regional Bruto		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

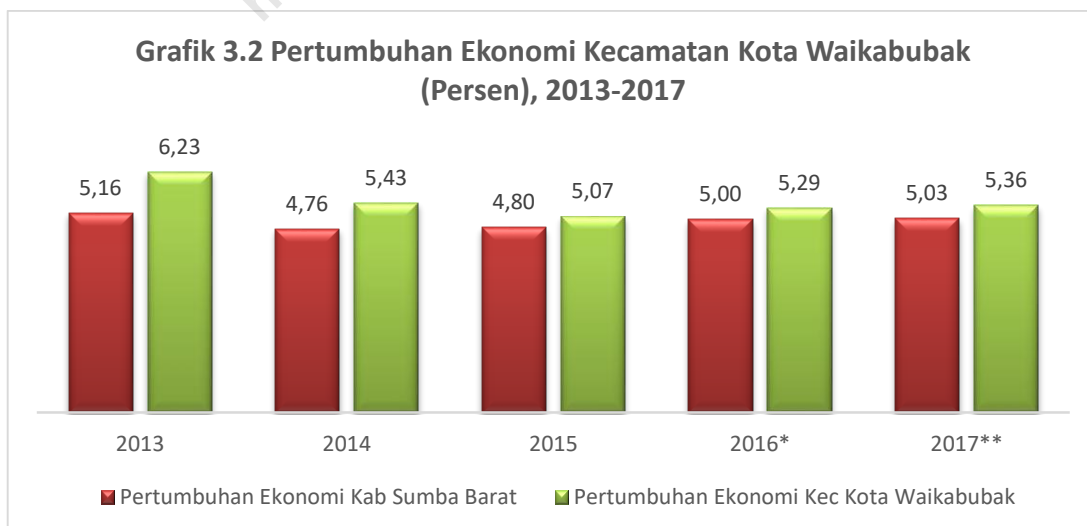
* Angka sementara

** Angka sangat sementara

3.2 Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian Kecamatan Kota Waikabubak selama lima tahun terakhir terus mengalami peningkatan. Hal ini ditunjukkan oleh tingkat pertumbuhan ekonomi yang selalu positif. Tingkat pertumbuhan ekonomi kecamatan kota waikabubak juga selalu lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi kabupaten sumba barat. Hal ini menunjukkan bahwa perekonomian kecamatan kota waikabubak tumbuh lebih cepat dibandingkan rata-rata pertumbuhan ekonomi kecamatan-kecamatan di kabupaten sumba barat.

Pada tahun 2017 laju pertumbuhan PDRB Kecamatan Kota Waikabubak mencapai 5,36 persen, meningkat dibandingkan tahun 2016 sebesar 5,29 persen. Adapun 3 kategori yang memiliki nilai pertumbuhan ekonomi tertinggi adalah kategori Real Estat sebesar 10,39 persen; kategori Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; dan Kategori Jasa Pendidikan. Tingginya pertumbuhan ketiga sektor tersier tersebut didorong oleh letak kecamatan ini yang strategis sebagai ibu kota kabupaten dan pusat ekonomi di kabupaten sumba barat. Terkonsentrasinya sebagian besar pelaku ekonomi di kota waikabubak menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi, khususnya sektor sekunder seperti industri pengolahan dan konstruksi, dan juga sektor tersier seperti perdagangan, dan jasa-jasa. Laju pertumbuhan ekonomi kecamatan kota waikabubak digambarkan dalam grafik di bawah, sedangkan laju pertumbuhan ekonomi menurut kategori lapangan usaha digambarkan dalam tabel 3.2.



Tabel 3.2**Laju Pertumbuhan Riil PDRB Menurut Lapangan Usaha (persen), 2013-2017**

Kategori		2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,58	1,65	2,52	2,68	3,05
B	Pertambangan dan Penggalian	3,30	4,53	6,86	7,17	6,81
C	Industri Pengolahan	6,79	4,92	4,74	4,36	5,79
D	Pengadaan Listrik dan Gas	4,10	5,45	0,85	0,13	1,54
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,10	4,94	6,15	6,74	7,67
F	Konstruksi	5,62	6,35	7,20	9,64	9,19
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9,46	8,58	6,01	6,64	6,81
H	Transportasi dan Pergudangan	4,28	4,98	6,48	10,76	9,43
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9,46	9,07	5,71	7,53	7,18
J	Informasi dan Komunikasi	3,56	5,57	6,30	8,37	8,52
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	7,15	7,63	7,44	8,79	8,85
L	Real Estat	7,15	7,09	5,79	8,65	10,39
M,N	Jasa Perusahaan	7,15	5,16	6,87	6,49	5,48
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6,88	5,27	5,57	4,89	3,74
P	Jasa Pendidikan	6,88	5,67	8,92	9,30	9,60
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,88	6,90	5,22	9,13	9,97
R,S,T,U	Jasa lainnya	3,73	2,90	2,01	2,30	2,65
Produk Domestik Regional Bruto		6,23	5,43	5,07	5,29	5,36

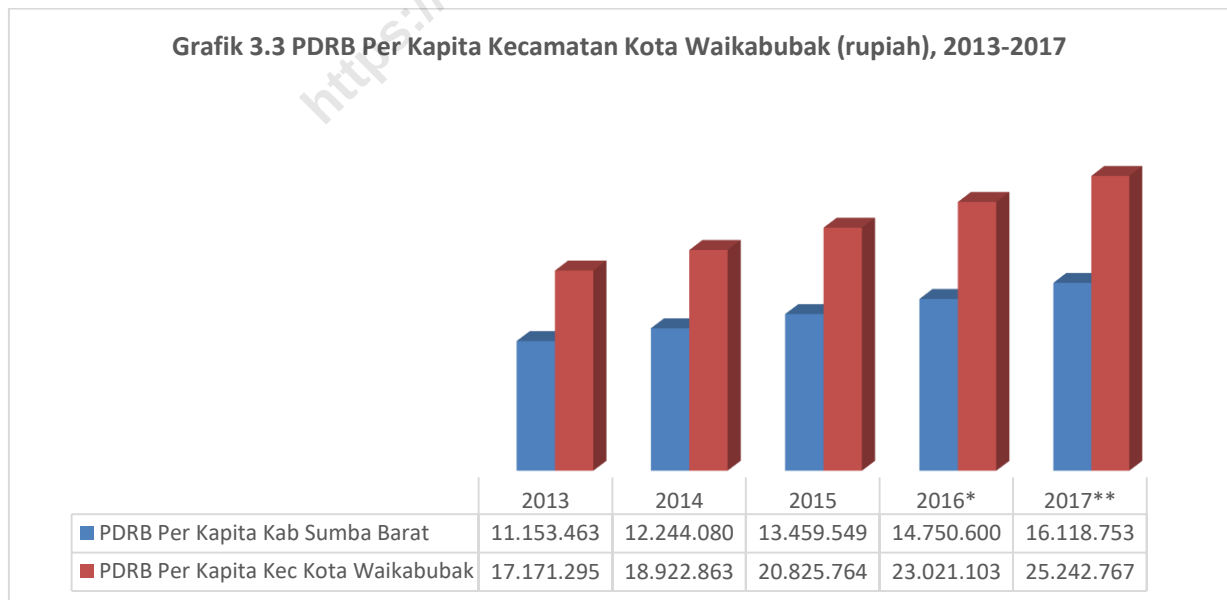
* Angka sementara

** Angka sangat sementara

3.3 PDRB Perkapita

Bila PDRB suatu daerah dibagi dengan jumlah penduduk yang tinggal di daerah itu, maka akan dihasilkan suatu PDRB Per kapita. PDRB Per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Seiring perkembangan perekonomian kecamatan kota waikabubak yang ditandai dengan peningkatan nilai PDRB, nilai PDRB per kapitanya selama lima tahun terakhir juga terus mengalami peningkatan. Nilai PDRB per kapita kecamatan kota waikabubak juga selalu lebih tinggi dari PDRB per kapita kabupaten sumba barat. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata penduduk di kecamatan kota waikabubak lebih produktif dalam menghasilkan nilai tambah barang dan jasa dibandingkan rata-rata penduduk kabupaten sumba barat. Pada tahun 2017, PDRB per kapita kecamatan kota waikabubak sebesar mencapai Rp. 25 jutaan, sedangkan PDRB per kapita kabupaten sumba barat sebesar Rp. 16 jutaan. Dengan kata lain, pada tahun 2017, rata-rata satu orang penduduk kecamatan kota waikabubak menghasilkan nilai tambah barang dan jasa sebesar 57 persen lebih tinggi dibandingkan rata-rata penduduk seluruh kecamatan di kabupaten sumba barat.

Berdasarkan tabel 3.3, pada tahun 2017, 3 kategori dengan PDRB perkapita tertinggi adalah kategori Administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib; kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; dan kategori industri pengolahan.



Tabel 3.3**PDRB Per Kapita Menurut Lapangan Usaha (Rp), 2013-2017**

	Kategori	2013	2014	2015	2016*	2017**
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.117.636	2.289.581	2.508.495	2.686.709	2.846.782
B	Pertambangan dan Penggalian	12.066	13.074	14.677	15.938	17.131
C	Industri Pengolahan	3.213.792	3.596.436	3.965.533	4.328.812	4.698.752
D	Pengadaan Listrik dan Gas	100.281	116.720	133.434	160.945	181.365
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5.996	6.407	6.847	7.460	8.163
F	Konstruksi	269.335	301.137	337.781	389.476	440.050
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.053.182	3.423.167	3.824.382	4.270.803	4.725.471
H	Transportasi dan Pergudangan	317.702	340.531	378.058	431.846	483.373
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	135.857	157.870	178.937	200.912	218.763
J	Informasi dan Komunikasi	203.671	218.103	230.358	251.037	276.879
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	631.125	709.093	769.556	852.417	970.129
L	Real Estat	176.462	202.710	228.653	263.162	302.692
M,N	Jasa Perusahaan	23.854	27.009	30.908	34.945	39.430
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5.159.232	5.602.812	6.113.718	6.825.935	7.514.335
P	Jasa Pendidikan	338.905	386.283	454.451	530.877	624.844
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	304.844	344.253	382.941	437.828	497.881
R,S,T,U	Jasa lainnya	1.107.356	1.187.676	1.267.034	1.331.999	1.396.727
Produk Domestik Regional Bruto		17.171.295	18.922.863	20.825.764	23.021.103	25.242.767

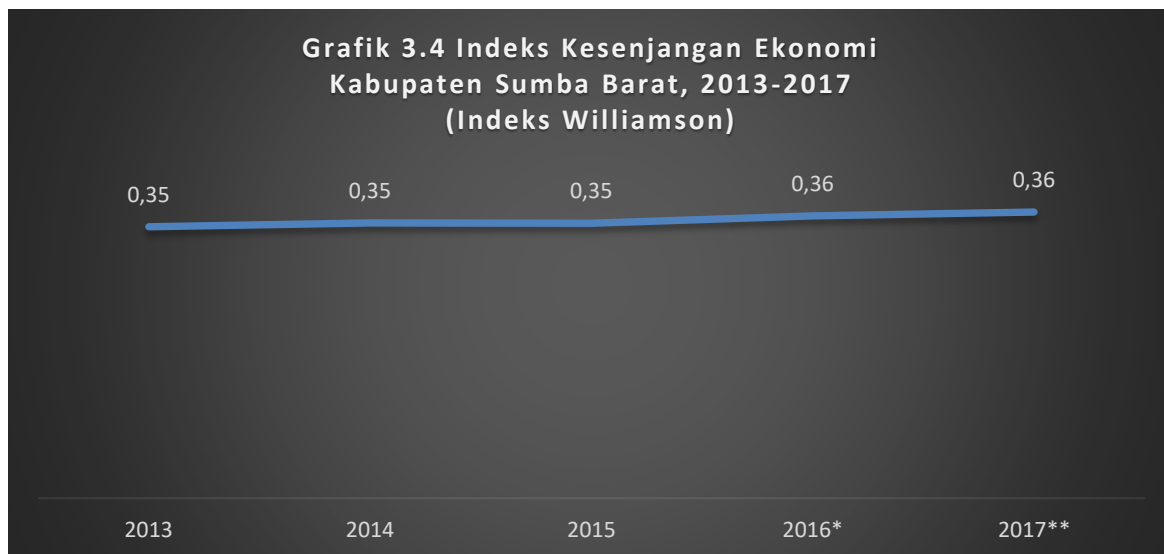
* Angka sementara

** Angka sangat sementara

3.4 Kesenjangan Ekonomi Wilayah

Kesenjangan berarti suatu gambaran terhadap fakta atau kondisi yang tidak homogen, yang di dalamnya terdapat perbedaan-perbedaan yang membutuhkan perhatian. Atas dasar pengertian tersebut, penghitungan kesenjangan ekonomi wilayah dimaksudkan untuk memberi gambaran fakta-fakta perbedaan perkembangan kondisi ekonomi antar kecamatan di kabupaten sumba barat pada tahun 2013-2017. Untuk merepresentasikan kesenjangan ekonomi antar kecamatan di kabupaten sumba barat, maka digunakan indeks Williamson. Hasil kesenjangan berdasarkan indeks Williamson dikelompokkan ke dalam empat kategori yaitu kategori kesenjangan sangat tinggi (indeks Williamson lebih besar dari 1), kategori kesenjangan tinggi (indeks williamson sebesar 0,7 sampai 1), kategori kesenjangan menengah (indeks Williamson sebesar 0,40 sampai 0,69), dan kategori kesenjangan rendah (indeks Williamson kurang dari 0,40).

Berdasarkan grafik di bawah, indeks Williamson di kabupaten sumba barat selama tahun 2013-2017 kurang dari 0,40. Hal ini menunjukkan bahwa kesenjangan ekonomi antar kecamatan di kabupaten sumba barat masih tergolong rendah. Meskipun demikian, terdapat kecenderungan peningkatan kesenjangan ekonomi antar kecamatan di kabupaten sumba barat. Peningkatan kesenjangan ekonomi tersebut ditunjukkan oleh nilai indeks Williamson yang semakin meningkat selama lima tahun terakhir. Hal ini disebabkan oleh distribusi PDRB per kapita yang semakin lebar antar kecamatan. Oleh karena itu, untuk menurunkan kesenjangan ekonomi tersebut, diperlukan optimalisasi potensi-potensi ekonomi sesuai karakteristik masing-masing kecamatan.



BAB IV.

PERTUMBUHAN DAN PERANAN PDRB MENURUT LAPANGAN USAHA

PDRB Kecamatan Kota Waikabubak menurut kategori dirinci menjadi 17 kategori dan sebagian besar kategori dirinci lagi menjadi subkategori. Pemecahan menjadi subkategori atau golongan ini disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Kategori Indonesia (KBLI) 2009. Perkembangan setiap kategori diuraikan di bawah ini, namun penjelasan dalam uraian ini hanya mencakup sampai tingkat kategori. Hal ini dikarenakan terbatasnya data yang mencakup sampai tingkat kecamatan.

4.1 Pertanian, Kehutanan, Dan Perikanan

Kategori ini mencakup subkategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang terdiri atas golongan tanaman pangan, golongan tanaman hortikultura semusim, golongan tanaman perkebunan semusim, golongan tanaman hortikultura tahunan, golongan tanaman perkebunan tahunan, golongan peternakan, dan golongan jasa pertanian dan perburuan, subkategori Usaha Kehutanan dan Penebangan Kayu, dan Subkategori Perikanan. Kategori ini masih menjadi tumpuan dan harapan dalam penyerapan tenaga kerja.

Pada tahun 2017 kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan memberi kontribusi terhadap PDRB atas dasar harga berlaku sebesar 11,28 persen, mengalami sedikit penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan peningkatan kontribusi sektor sekunder dan tersier yang lebih cepat dibandingkan sektor primer seperti kategori ini. Meskipun demikian, kategori ini masih termasuk 5 besar kategori dengan kontribusi tertinggi bagi nilai PDRB kecamatan kota waikabubak. Pada tahun 2017, pertumbuhan kategori ini atas dasar harga konstan mencapai 3,05 persen, atau lebih tinggi dibandingkan tahun 2016. Meskipun demikian, pertumbuhan sektor ini relatif rendah. Hal ini umum terjadi pada wilayah yang bukan konsentrasi pertanian dan minim pembukaan lahan pertanian baru.

4.2 Pertambangan dan Penggalan

Kategori ini mencakup subkategori Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi; Pertambangan Batubara dan Lignit; Pertambangan Bijih Logam; Pertambangan dan Penggalan Lainnya. Pada tahun 2017, kategori Pertambangan dan Penggalan memberi kontribusi terhadap

PDRB atas dasar harga berlaku sebesar 0,07 persen. Pertumbuhan atas dasar harga konstan untuk golongan ini mengalami sedikit penurunan menjadi 6,81 persen pada tahun 2017.

Nilai tambah kategori Pertambangan dan Penggalian diperoleh dari aktivitas Pertambangan dan Penggalian Lainnya selama 5 tahun terakhir. Hal ini dikarenakan, di wilayah Kecamatan Kota Waikabubak tidak terdapat lokasi pertambangan minyak gas bumi ataupun logam seperti emas, tembaga, perak maupun non logam. Produk pertambangan dan penggalian lainnya di Kecamatan Kota Waikabubak ini hanya diperoleh dari produk penggalian saja seperti penggalian pasir, batu, tanah, kerikil, dan lainnya.

4.3 Industri Pengolahan

Industri pengolahan merupakan salah satu tulang punggung perekonomian kecamatan kota waikabubak. Kontribusi kategori ini terhadap PDRB kecamatan kota waikabubak mencapai 18,61 persen pada tahun 2017. Nilai kontribusi ini merupakan yang tertinggi setelah kategori administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib dan kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor. Di samping itu, pertumbuhan industri pengolahan pada tahun 2017 mencapai 5,79 persen. Nilai pertumbuhan ini lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya.

Industri pengolahan merupakan sektor sekunder yang menggunakan output dari sektor primer seperti kategori pertanian, kehutanan, perikanan, serta pertambangan dan penggalian. Oleh karena itu, tingginya kontribusi kategori ini dan juga pertumbuhannya yang relatif meningkat selama 5 tahun terakhir menjadi stimulan bagi peningkatan produksi sektor primer baik di kecamatan ini maupun kecamatan lain di kabupaten sumba barat.

4.4 Pengadaan Listrik dan Gas

Kategori Pengadaan Listrik dan Gas memiliki peranan minor jika berdiri sendiri, tetapi kategori ini merupakan penyokong pengembangan kategori lainnya. Kontribusi kategori listrik dan gas terhadap nilai PDRB kecamatan kota waikabubak selama 5 tahun terakhir kurang dari 1 persen per tahun. Sementara itu, pertumbuhan kategori ini selama 5 tahun terakhir relatif melambat. Lambatnya pertumbuhan pengadaan listrik dan gas sangat dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah terkait tarif dasar listrik dan juga permintaan konsumen. Semakin tinggi aktivitas ekonomi sektor sekunder yang menggunakan mesin atau alat seperti industri pengolahan, dan sektor tersier seperti kategori informasi dan komunikasi, maka semakin besar pengadaan listrik.

4.5 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang

Kategori ini mencakup kegiatan ekonomi pengumpulan, pengolahan dan pendistribusian air melalui berbagai saluran pipa untuk kebutuhan rumah tangga dan industri. Termasuk juga kegiatan pengumpulan, penjernihan dan pengolahan air dan sungai, danau, mata air, hujan dan lain-lain. Tidak termasuk pengoperasian peralatan irigasi untuk keperluan pertanian. Selama 5 tahun terakhir, kategori ini memiliki kontribusi terhadap PDRB kecamatan kota waikabubak sekitar 0,3 persen per tahun. Meskipun memiliki peran yang minor dalam struktur PDRB, pertumbuhan kategori ini relatif meningkat setiap tahun. Pada tahun 2017, kategori ini tumbuh sebesar 7,67 persen.

Sebagai informasi tambahan, pengadaan air di Kecamatan Kota Waikabubak ini masih didominasi oleh penjualan air oleh pihak perorangan yang jalur distribusinya sampai ke tingkat desa/kelurahan karena di wilayah ini masih kekurangan air bersih dan sarana pengadaan air bersih. Adapun PDAM tidak tersedia di Kabupaten Sumba Barat.

4.6 Konstruksi

Kategori konstruksi merupakan salah satu sektor sekunder yang menggunakan output dari sektor primer yaitu kategori pertambangan dan penggalian. Pertumbuhan kategori ini menjadi stimulan bagi pertumbuhan sektor pertambangan dan penggalian sebagai sumber bahan baku konstruksi. Selama lima tahun terakhir, sektor ini menyumbang satu sampai dua persen per tahun terhadap nilai PDRB kecamatan kota waikabubak. Pertumbuhan kategori ini berfluktuasi selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2017 kategori ini tumbuh cukup tinggi yaitu sebesar 9,19 persen. Pertumbuhan kategori ini diikuti oleh pertumbuhan kategori primer penyedia bahan baku, yaitu kategori pertambangan dan penggalian.

4.7 Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

Selama 5 tahun terakhir, Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor termasuk dalam 3 kategori yang memiliki peranan terbesar dalam perekonomian kecamatan kota waikabubak. Pada tahun 2017, kontribusi atas dasar harga berlaku kategori ini terhadap perekonomian kecamatan kota waikabubak sebesar 18,72 persen. Hal tersebut didukung oleh pertumbuhan sektor perdagangan yang positif. Pada tahun 2017, laju pertumbuhan kategori ini sebesar 6,81 persen. Selama lima tahun terakhir kategori ini terus tumbuh di atas rata-rata

pertumbuhan seluruh kategori lapangan usaha. Hal ini menunjukkan aktivitas perdagangan dan reparasi telah menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi kecamatan kota waikabubak. Aktivitas Perdagangan Besar dan Eceran Bukan Mobil dan Sepeda Motor, menjadi penggerak utama kategori ini. Hal tersebut meliputi perdagangan eceran berbagai macam barang di toko, kios, kaki lima dan los pasar.

Sebagai sektor tersier, pertumbuhan kategori ini dipengaruhi oleh pertumbuhan sektor primer dan sekunder. Sektor primer seperti pertanian, kehutanan, dan perikanan serta pertambangan dan penggalian yang tumbuh pada tahun 2017 turut mendorong pertumbuhan kategori ini. Sektor sekunder seperti industri pengolahan dan konstruksi yang meningkat pada tahun 2017 juga memiliki peran penting bagi pertumbuhan kategori ini di kecamatan kota waikabubak.

4.8 Transportasi dan Pergudangan

Transportasi dan Pergudangan terdiri dari 6 subkategori, yaitu subkategori Angkutan Rel, subkategori Angkutan Darat, subkategori Angkutan Laut, subkategori Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan, subkategori Angkutan Udara, serta subkategori Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan. Pembentukan nilai pada kategori ini untuk wilayah Kecamatan Kota Waikabubak hanya diperoleh dari aktivitas Angkutan Darat dan aktivitas pergudangan dan jasa penunjang angkutan. Kategori ini memberikan kontribusi bagi perekonomian kecamatan kota waikabubak selama lima tahun terakhir hampir 2 persen per tahun. Kecamatan Kota Waikabubak tidak memiliki pelabuhan untuk sarana pengoperasian angkutan laut dan juga tidak memiliki bandara untuk sarana pengoperasian angkutan udara. Meskipun hanya ditopang oleh aktivitas angkutan darat, kategori ini tumbuh sebesar 9,43 persen pada tahun 2017.

4.9 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

Pada tahun 2017, kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum berkontribusi terhadap PDRB Kecamatan Kota Waikabubak sebesar 0,87 persen. Kontribusinya bagi perekonomian selama lima tahun terakhir tidak lebih dari satu persen per tahun. Sementara itu, secara keseluruhan, kategori ini tumbuh 7,18 persen pada tahun 2017. Tingkat pertumbuhan ini sedikit melambat dibandingkan tahun sebelumnya. Kontribusi yang minor dan pertumbuhannya yang melambat ini tidak terlepas dari masih rendahnya aktivitas penyediaan akomodasi jangka pendek maupun

panjang seperti hotel, pondok wisata, dan bangunan kos-kosan. Sebagai pusat ekonomi kabupaten sumba barat, kecamatan kota waikabubak perlu mendorong promosi pariwisata lokal yang erat kaitannya dengan akomodasi. Selain itu, pengembangan UMKM yang bergerak di bidang penyediaan makan minum juga menjadi langkah strategis peningkatan kategori ini.

4.10 Informasi dan Komunikasi

Kategori informasi dan komunikasi memiliki peranan sebagai penunjang aktivitas di setiap bidang ekonomi. Dalam era globalisasi, peranan kategori ini sangat vital dan menjadi indikator kemajuan suatu bangsa, terutama jasa telekomunikasi. Peranan kategori ini berdasarkan harga berlaku terhadap perekonomian di Kecamatan Kota Waikabubak selama tahun 2013-2017 sekitar satu persen per tahun. Meskipun kontribusinya minor, kategori terus meningkat selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2017, kategori ini tumbuh 8,52 persen. Pertumbuhan yang terus meningkat ini tidak terlepas dari peningkatan jumlah pengguna sarana telekomunikasi di kecamatan ini. Peningkatan penggunaan sarana telekomunikasi seperti telepon seluler tentunya juga mendorong peningkatan penggunaan pulsa, baik voucher maupun elektrik.

4.11 Jasa Keuangan dan Asuransi

Kegiatan ekonomi pada lapangan usaha jasa perantara keuangan menjadi penyumbang mayoritas kontribusi perekonomian pada kategori jasa keuangan dan asuransi ini. Selama tahun lima tahun terakhir, kontribusi jasa keuangan dan asuransi berkisar antara 3 persen sampai 4 persen terhadap perekonomian kecamatan kota waikabubak. Kontribusi kategori ini didukung oleh pertumbuhannya yang relatif lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan ekonomi kecamatan kota waikabubak selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2017, kategori ini tumbuh sebesar 8,85 persen. Pertumbuhan kategori ini didukung oleh aktivitas keuangan, termasuk perantara moneter, asuransi, reasuransi, kegiatan dana pensiun, dan jasa penunjang keuangan.

4.12 Real Estat

Pertumbuhan kategori real estat cenderung meningkat selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2017, kategori ini tumbuh 10,39 persen. Meskipun pertumbuhannya cukup tinggi, kontribusi kategori real estat relatif stabil bagi PDRB Kecamatan Kota Waikabubak selama lima tahun terakhir, yaitu sekitar satu persen per tahun. Kontribusi yang minor ini dipengaruhi aktivitas real estat seperti

penyewaan properti berupa tanah atau bangunan yang masih minim di kecamatan kota waikabubak.

4.13 Jasa Perusahaan

Kontribusi kategori Jasa Perusahaan bagi perekonomian kecamatan kota waikabubak selama 5 tahun terakhir sekitar 0.15 persen per tahun. Peranan kategori ini relatif kecil dibandingkan peranan kategori-kategori lainnya pada perekonomian Kecamatan Kota Waikabubak. Hal ini dikarenakan belum banyaknya penyedia jasa yang pada umumnya melayani perusahaan seperti jasa hukum dan notaris, jasa akuntan dan pembukuan, jasa pengolahan dan penyajian data, jasa teknik dan arsitektur, jasa periklanan, jasa riset, jasa persewaan alat-alat dan jasa perusahaan lainnya. Meskipun kontribusinya relatif kecil bagi perekonomian, kategori ini terus tumbuh lebih dari 5 persen per tahun.

4.14 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib

Kategori ini meliputi kegiatan yang sifatnya pemerintahan, antara lain mencakup administrasi pemerintahan dan kebijakan ekonomi dan sosial, penyediaan layanan untuk masyarakat, pertahanan, keamanan dan ketertiban, dan jaminan sosial wajib. Ketergantungan ekonomi pada kategori ini cukup signifikan. Selama tahun 2013-2017, kategori ini memiliki peran paling besar dalam perekonomian kecamatan kota waikabubak sebagai ibukota kabupaten sumba barat. Pada tahun 2017, kontribusinya mencapai 29,77 persen dengan pertumbuhan sebesar 3,74 persen. Peranannya yang besar ini tidak terlepas dari lokasinya sebagai ibukota kabupaten sumba barat, dan juga pusat markas pertahanan dan ketertiban, serta aktivitas BPJS.

4.15 Jasa Pendidikan

Selama lima tahun terakhir, kontribusi kategori jasa pendidikan tidak lebih dari 2,5 persen per tahun. Pada tahun 2017 jasa pendidikan menyumbang sebesar 2,48 persen terhadap perekonomian Kecamatan Kota Waikabubak. Sementara itu, laju pertumbuhannya selama lima tahun terakhir sebesar 5,67 persen hingga 9,60 persen per tahun. Pada tahun 2017 kategori ini tumbuh sebesar 9,60 persen, sedikit meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan jasa pendidikan didorong oleh kegiatan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi, pendidikan lainnya, dan kegiatan penunjang pendidikan.

4.16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

Selama tahun 2013-2017, kategori ini menyumbang tidak lebih dari 2 persen per tahun bagi perekonomian kecamatan kota waikabubak. Meskipun kontribusi langsungnya bagi perekonomian relatif masih kecil, kategori ini terus meningkat selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2017, kategori ini tumbuh sebesar 9,97 persen. Pertumbuhan kategori ini antara lain dipengaruhi oleh aktivitas rumah sakit, praktik dokter dan dokter gigi, pelayanan kesehatan manusia lainnya, dan aktivitas sosial baik di dalam panti maupun di luar panti.

4.17 Jasa lainnya

Selama lima tahun terakhir, kontribusi jasa lainnya bagi perekonomian kecamatan kota waikabubak mencapai lebih dari 5 persen per tahun. Pada tahun 2017, kategori ini masuk lima besar penyumbang nilai tambah terbesar bagi perekonomian kecamatan kota waikabubak, yaitu dengan kontribusinya yang mencapai 5,53 persen. Sementara itu, pertumbuhan kategori ini selama lima tahun terakhir selalu lebih kecil dari pertumbuhan ekonomi kecamatan secara agregat. Hal ini menunjukkan pertumbuhan jasa lainnya lebih lambat dibandingkan pertumbuhan ekonomi kecamatan kota waikabubak secara umum. Kategori ini mencakup kesenian, hiburan dan rekreasi, aktivitas rumah tangga sebagai pemberi kerja, aktivitas menghasilkan barang dan jasa untuk kebutuhan sendiri, dan aktivitas jasa lainnya.

Lampiran

**Tabel 1. Produk Domestik Regional Bruto Kecamatan Kota Waikabubak Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Lapangan Usaha (juta rupiah), 2013—2017**

Lapangan Usaha		2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	65.212,60	71.773,80	79.855,44	86.721,60	91.888,44
B	Pertambangan dan Penggalian	371,57	409,85	467,21	514,43	552,95
C	Industri Pengolahan	98.968,72	112.741,09	126.238,79	139.725,40	151.666,32
D	Pengadaan Listrik dan Gas	3.088,15	3.658,94	4.247,73	5.194,99	5.854,08
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	184,63	200,84	217,96	240,80	263,49
F	Konstruksi	8.294,16	9.440,06	10.752,92	12.571,52	14.203,93
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	94.022,75	107.309,43	121.745,37	137.852,99	152.528,76
H	Transportasi dan Pergudangan	9.783,64	10.674,98	12.035,09	13.939,13	15.602,31
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4.183,70	4.948,91	5.696,29	6.485,04	7.061,22
J	Informasi dan Komunikasi	6.272,05	6.837,09	7.333,23	8.102,97	8.937,11
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	19.435,50	22.228,64	24.498,06	27.514,32	31.313,81
L	Real Estat	5.434,14	6.354,56	7.278,93	8.494,35	9.770,29
M,N	Jasa Perusahaan	734,59	846,68	983,94	1.127,96	1.272,72
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	158.878,55	175.636,94	194.624,11	220.327,53	242.547,69
P	Jasa Pendidikan	10.436,59	12.109,20	14.467,00	17.135,64	20.168,72
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9.387,66	10.791,63	12.190,55	14.132,23	16.070,61
R,S,T,U	Jasa lainnya	34.101,02	37.231,28	40.334,76	42.994,28	45.083,56
Produk Domestik Regional Bruto		528.790,02	593.193,90	662.967,38	743.075,18	814.786,02
Produk Domestik Regional Bruto Tanpa Migas		528.790,02	593.193,90	662.967,38	743.075,18	814.786,02

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

**Tabel 2. Produk Domestik Regional Bruto Kecamatan Kota Waikabubak Atas Dasar Harga Konstan 2010
Menurut Lapangan Usaha (juta rupiah), 2013—2017**

Lapangan Usaha		2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	51.290,77	52.137,67	53.453,21	54.884,73	56.557,15
B	Pertambangan dan Penggalian	314,91	329,17	351,76	376,96	402,64
C	Industri Pengolahan	82.472,00	86.530,67	90.635,89	94.591,70	100.066,73
D	Pengadaan Listrik dan Gas	3.851,01	4.061,07	4.095,44	4.100,69	4.163,75
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	160,46	168,38	178,73	190,78	205,41
F	Konstruksi	7.091,60	7.541,98	8.085,18	8.864,55	9.678,84
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	81.274,25	88.250,43	93.555,76	99.763,71	106.559,99
H	Transportasi dan Pergudangan	8.526,68	8.951,13	9.531,35	10.557,19	11.552,24
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3.386,47	3.693,77	3.904,60	4.198,74	4.500,14
J	Informasi dan Komunikasi	5.255,21	5.547,88	5.897,42	6.391,09	6.935,80
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	15.887,78	17.100,49	18.372,34	19.987,13	21.755,46
L	Real Estat	4.390,05	4.701,45	4.973,80	5.403,81	5.965,10
M,N	Jasa Perusahaan	627,15	659,49	704,83	750,54	791,65
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	131.591,55	138.526,64	146.235,92	153.385,43	159.115,86
P	Jasa Pendidikan	8.122,94	8.583,13	9.348,39	10.218,24	11.198,98
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8.122,94	8.683,13	9.136,24	9.970,38	10.964,25
R,S,T,U	Jasa lainnya	28.686,63	29.518,46	30.110,73	30.804,73	31.619,67
Produk Domestik Regional Bruto		441.052,39	464.984,94	488.571,58	514.440,41	542.033,65
Produk Domestik Regional Bruto Tanpa Migas		441.052,39	464.984,94	488.571,58	514.440,41	542.033,65

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Tabel 3. Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kecamatan Kota Waikabubak Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (persen), 2013—2017

Lapangan Usaha		2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	12,33	12,10	12,05	11,67	11,28
B	Pertambangan dan Penggalian	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
C	Industri Pengolahan	18,72	19,01	19,04	18,80	18,61
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,58	0,62	0,64	0,70	0,72
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
F	Konstruksi	1,57	1,59	1,62	1,69	1,74
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	17,78	18,09	18,36	18,55	18,72
H	Transportasi dan Pergudangan	1,85	1,80	1,82	1,88	1,91
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,79	0,83	0,86	0,87	0,87
J	Informasi dan Komunikasi	1,19	1,15	1,11	1,09	1,10
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,68	3,75	3,70	3,70	3,84
L	Real Estat	1,03	1,07	1,10	1,14	1,20
M,N	Jasa Perusahaan	0,14	0,14	0,15	0,15	0,16
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	30,05	29,61	29,36	29,65	29,77
P	Jasa Pendidikan	1,97	2,04	2,18	2,31	2,48
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,78	1,82	1,84	1,90	1,97
R,S,T,U	Jasa lainnya	6,45	6,28	6,08	5,79	5,53
Produk Domestik Regional Bruto		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Produk Domestik Regional Bruto Tanpa Migas		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

**Tabel 4. Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kecamatan Kota Waikabubak Atas Dasar Harga Konstan 2010
Menurut Lapangan Usaha (persen), 2013—2017**

Lapangan Usaha		2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	11,63	11,21	10,94	10,67	10,43
B	Pertambangan dan Penggalian	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
C	Industri Pengolahan	18,70	18,61	18,55	18,39	18,46
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,87	0,87	0,84	0,80	0,77
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
F	Konstruksi	1,61	1,62	1,65	1,72	1,79
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	18,43	18,98	19,15	19,39	19,66
H	Transportasi dan Pergudangan	1,93	1,93	1,95	2,05	2,13
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,77	0,79	0,80	0,82	0,83
J	Informasi dan Komunikasi	1,19	1,19	1,21	1,24	1,28
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,60	3,68	3,76	3,89	4,01
L	Real Estat	1,00	1,01	1,02	1,05	1,10
M,N	Jasa Perusahaan	0,14	0,14	0,14	0,15	0,15
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	29,84	29,79	29,93	29,82	29,36
P	Jasa Pendidikan	1,84	1,85	1,91	1,99	2,07
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,84	1,87	1,87	1,94	2,02
R,S,T,U	Jasa lainnya	6,50	6,35	6,16	5,99	5,83
Produk Domestik Regional Bruto		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Produk Domestik Regional Bruto Tanpa Migas		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Tabel 5. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kecamatan Kota Waikabubak Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (persen), 2013—2017

Lapangan Usaha		2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	9,56	10,06	11,26	8,60	5,96
B	Pertambangan dan Penggalian	12,94	10,30	14,00	10,11	7,49
C	Industri Pengolahan	13,52	13,92	11,97	10,68	8,55
D	Pengadaan Listrik dan Gas	-1,12	18,48	16,09	22,30	12,69
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7,05	8,78	8,52	10,48	9,42
F	Konstruksi	10,91	13,82	13,91	16,91	12,99
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	15,07	14,13	13,45	13,23	10,65
H	Transportasi dan Pergudangan	9,64	9,11	12,74	15,82	11,93
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	17,29	18,29	15,10	13,85	8,88
J	Informasi dan Komunikasi	10,05	9,01	7,26	10,50	10,29
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	15,27	14,37	10,21	12,31	13,81
L	Real Estat	17,70	16,94	14,55	16,70	15,02
M,N	Jasa Perusahaan	16,15	15,26	16,21	14,64	12,83
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	13,88	10,55	10,81	13,21	10,09
P	Jasa Pendidikan	17,35	16,03	19,47	18,45	17,70
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	12,29	14,96	12,96	15,93	13,72
R,S,T,U	Jasa lainnya	12,59	9,18	8,34	6,59	4,86
Produk Domestik Regional Bruto		13,26	12,18	11,76	12,08	9,65
Produk Domestik Regional Bruto Tanpa Migas		13,26	12,18	11,76	12,08	9,65

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

**Tabel 6. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kecamatan Kota Waikabubak Atas Dasar Harga Konstan 2010
Menurut Lapangan Usaha (persen), 2013—2017**

Lapangan Usaha		2013	2014	2015	2016*	2017**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,58	1,65	2,52	2,68	3,05
B	Pertambangan dan Penggalian	3,30	4,53	6,86	7,17	6,81
C	Industri Pengolahan	6,79	4,92	4,74	4,36	5,79
D	Pengadaan Listrik dan Gas	4,10	5,45	0,85	0,13	1,54
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,10	4,94	6,15	6,74	7,67
F	Konstruksi	5,62	6,35	7,20	9,64	9,19
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9,46	8,58	6,01	6,64	6,81
H	Transportasi dan Pergudangan	4,28	4,98	6,48	10,76	9,43
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9,46	9,07	5,71	7,53	7,18
J	Informasi dan Komunikasi	3,56	5,57	6,30	8,37	8,52
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	7,15	7,63	7,44	8,79	8,85
L	Real Estat	7,15	7,09	5,79	8,65	10,39
M,N	Jasa Perusahaan	7,15	5,16	6,87	6,49	5,48
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6,88	5,27	5,57	4,89	3,74
P	Jasa Pendidikan	6,88	5,67	8,92	9,30	9,60
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,88	6,90	5,22	9,13	9,97
R,S,T,U	Jasa lainnya	3,73	2,90	2,01	2,30	2,65
Produk Domestik Regional Bruto		6,23	5,43	5,07	5,29	5,36
Produk Domestik Regional Bruto Tanpa Migas		6,23	5,43	5,07	5,29	5,36

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

**Tabel 7. Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto Kecamatan Kota Waikabubak
Menurut Lapangan Usaha (2010 = 100), 2013—2017**

Lapangan Usaha		2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	127,14	137,66	149,39	158,01	162,47
B	Pertambangan dan Penggalian	117,99	124,51	132,82	136,47	137,33
C	Industri Pengolahan	120,00	130,29	139,28	147,71	151,57
D	Pengadaan Listrik dan Gas	80,19	90,10	103,72	126,69	140,60
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	115,07	119,28	121,95	126,22	128,28
F	Konstruksi	116,96	125,17	133,00	141,82	146,75
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	115,69	121,60	130,13	138,18	143,14
H	Transportasi dan Pergudangan	114,74	119,26	126,27	132,03	135,06
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	123,54	133,98	145,89	154,45	156,91
J	Informasi dan Komunikasi	119,35	123,24	124,35	126,79	128,85
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	122,33	129,99	133,34	137,66	143,94
L	Real Estat	123,78	135,16	146,35	157,19	163,79
M,N	Jasa Perusahaan	117,13	128,38	139,60	150,29	160,77
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	120,74	126,79	133,09	143,64	152,43
P	Jasa Pendidikan	128,48	141,08	154,75	167,70	180,09
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	115,57	124,28	133,43	141,74	146,57
R,S,T,U	Jasa lainnya	118,87	126,13	133,95	139,57	142,58
Produk Domestik Regional Bruto		121,89	130,03	138,68	147,10	153,06
Produk Domestik Regional Bruto Tanpa Migas		121,89	130,03	138,68	147,10	153,06

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Tabel 8. Laju Pertumbuhan Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto Kecamatan Kota Waikabubak Menurut Lapangan Usaha (persen), 2013—2017

Lapangan Usaha		2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	8,94	8,27	8,52	5,77	2,82
B	Pertambangan dan Penggalian	9,33	5,52	6,68	2,74	0,63
C	Industri Pengolahan	6,29	8,57	6,90	6,05	2,61
D	Pengadaan Listrik dan Gas	-5,01	12,35	15,12	22,14	10,98
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,83	3,66	2,24	3,50	1,63
F	Konstruksi	5,01	7,02	6,25	6,63	3,48
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,13	5,11	7,02	6,18	3,59
H	Transportasi dan Pergudangan	5,15	3,94	5,88	4,57	2,29
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,15	8,45	8,89	5,87	1,59
J	Informasi dan Komunikasi	6,27	3,26	0,90	1,96	1,63
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	7,58	6,26	2,58	3,24	4,56
L	Real Estat	9,85	9,19	8,27	7,41	4,20
M,N	Jasa Perusahaan	8,40	9,61	8,74	7,66	6,98
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6,55	5,01	4,97	7,93	6,12
P	Jasa Pendidikan	9,80	9,81	9,69	8,36	7,39
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,06	7,54	7,36	6,23	3,41
R,S,T,U	Jasa lainnya	8,54	6,10	6,20	4,19	2,16
Produk Domestik Regional Bruto		7,31	6,68	6,65	6,08	4,05
Produk Domestik Regional Bruto Tanpa Migas		7,31	6,68	6,65	6,08	4,05

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

**Tabel 9. Indeks Kesenjangan Ekonomi
di Kabupaten Sumba Barat, 2013—2017**

Kecamatan	Indeks Kesenjangan Ekonomi (Indeks Williamson)				
	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kota Waikabubak	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18
Loli	0,06	0,06	0,05	0,06	0,06
Wanokaka	0,06	0,06	0,05	0,06	0,06
Lamboya	0,12	0,12	0,13	0,13	0,14
Tana Righu	0,32	0,33	0,32	0,32	0,32
Laboya Barat	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Sumba Barat	0,35	0,35	0,35	0,36	0,36

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Kriteria Indeks Kesenjangan Ekonomi

Indeks Williamson	Kriteria Kesenjangan
(1)	(2)
>1	Sangat Tinggi
0,7 - 1	Tinggi
0,40 - 0,69	Menengah
<0,40	Rendah

**Tabel 10. Laju Pertumbuhan Indeks Kesenjangan Ekonomi
di Kabupaten Sumba Barat, 2013—2017**

Kecamatan	Perubahan Indeks Kesenjangan Ekonomi (Indeks Williamson)					Laju Pertumbuhan Indeks Kesenjangan Ekonomi (Indeks Williamson)				
	2013	2014	2015	2016*	2017**	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Kota Waikabubak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46	0,71	0,15	1,45	0,50
Loli	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	10,85	0,38	-6,73	1,32	5,80
Wanokaka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,91	-0,30	-6,43	5,69	4,39
Lamboya	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	-0,83	2,04	3,98	6,73	4,74
Tana Righu	0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	1,79	1,45	-1,62	-0,49	-0,10
Laboya Barat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,51	14,37	-9,15	12,58	25,44
Sumba Barat	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,88	1,01	-0,09	1,90	0,99

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

DATA

MENCERDASKAN BANGSA

— *Enlighten The Nation* —



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN SUMBA BARAT**

Jalan Wee Karou, Waikabubak 87211; Telp. (0387) 21256;
Fax. (0387) 21256; E-mail: bps5301@bps.go.id; Homepage: <http://sumbabaratkab.bps.go.id>

